



**LAPORAN
AKUNTABILITAS KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH
DINAS KESEHATAN
TA 2025**

**DINAS KESEHATAN
KABUPATEN TABANAN**

KATA PENGANTAR



Angayu bagia kami aturkan kehadapan Ida Sang Hyang Widhi Wasa (Tuhan Yang Maha Esa), karena atas asung kerta waranugrahanya, kami dapat menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) OPD Dinas Kesehatan Kabupaten Tabanan Tahun 2025.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) sesuai dengan amanat Pemerintah melalui Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah merupakan media pertanggung jawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta kewenangan pengelolaan sumber daya berdasarkan Rencana Strategi yang sudah ditetapkan.

Dengan berbagai keterbatasan yang ada, disadari LKjIP Tahun 2025 ini masih banyak kekurangannya. Untuk itu koreksi yang sifatnya konstruktif terhadap mutu baik substansi maupun penyajian LKjIP ini sangat kami harapkan. Sehingga kinerja OPD Kesehatan Kabupaten Tabanan secara bertahap dapat mewujudkan visi dan misinya untuk kepentingan masyarakat.

Akhirnya, kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan dan informasi penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Tahun 2025 pada Dinas Kesehatan Kabupaten.

Singasana, 23 Februari 2026

Kepala Dinas Kesehatan
Kabupaten Tabanan



dr. Ida Bagus Surya Wira Andi, S.Ked., M.M.

Pembina Tk I, IV/b

NIP. 19840327 201001 1 032

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	v
DAFTAR BAGAN	vi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Maksud dan Tujuan.....	2
1.3 Landasan Hukum	2
1.4 Analisis Aspek Strategis	4
1.4.1 Aspek Sumber Daya Manusia.....	4
1.4.2 Aspek Sarana Pelayanan Kesehatan	5
1.4.3 Aspek Pembiayaan Kesehatan	5
1.4.4 Aspek Wilayah	6
1.5 Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Pejabat Dinas Kesehatan	7
1.6 Isu-isu Strategis.....	13
1.7 Sistematika Penyajian.....	14
BAB II PERENCANAAN KINERJA	15
2.1 Rencana Strategis Tahun 2021-2026.....	15
2.2 Perjanjian Kinerja Tahun 2025	17
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	43
3.1 Kerangka Pengukuran Kinerja.....	43
3.1.1 Penetapan Kinerja.....	43
3.1.2 Pengumpulan Data Kinerja.	43
3.1.3 Metode/Cara Pengukuran Kinerja.....	44
3.2 Capaian Kinerja Organisasi.....	45
3.2.1 Perbandingan Target dan Realisasi Indikator Kinerja Tahun 2025 dan Tahun Sebelumnya Dengan Renstra Dinas Kesehatan Tahun 2021 s/d 2026	45
3.2.2 Analisis keberhasilan/ kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternatif solusi.	55
3.2.3 Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya	57
3.2.4 Analisis program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja).	58
3.3 Realisasi Anggaran Tahun 2025	88

BAB IV	102
PENUTUP	102
4.1 Kesimpulan	102
4.2 Saran.....	103

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Distribusi pegawai menurut Jenis kepegawaian dan golongan Tahun 2025.....	4
Tabel 1.2 Distribusi Pegawai Menurut Jenis Fungsional Tahun 2025	4
Tabel 1.3 Jenis dan Jumlah Sarana Kesehatan Di Kabupaten Tabanan Tahun 2025.....	5
Tabel 1.4 Alokasi Pembiayaan Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Tabanan Tahun 2025.....	6
Tabel 2.1 Sasaran Strategis, Perjanjian Kinerja dan Target Tahun 2025.....	18
Tabel 2.2 Rincian Pendanaan Dinas Kesehatan Berdasarkan Program Pembangunan Tahun 2025.....	19
Tabel 2.3 Sasaran, Indikator, Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan serta Target Kinerja dan Anggaran Dinas Kesehatan Tahun 2025.....	25
Tabel 3.1 Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dan Tahun Sebelumnya.....	45
Tabel 3.2 Perbandingan Target, Realisasi, dan Capaian Kinerja Sasaran Tahun 2021, 2022, 2023, 2024, dan 2025 Dinas Kesehatan Kabupaten Tabanan.....	50
Tabel 3.3 Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Tabanan dengan Standar Nasional Tahun 2025.....	52
Tabel 3.4 Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Dinas Kesehatan Kabupaten Tabanan Tahun 2025.....	62
Tabel 3.5 Realisasi Anggaran Pada Dinas Kesehatan Tahun 2025.....	88

DAFTAR BAGAN

Bagan 1.1 Struktur Organisasi PD Dinas Kesehatan Kabupaten Tabanan.....	8
---	---

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pengembangan sistem penyelenggaraan pemerintahan yang terukur dan legitimate merupakan sebuah syarat terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*Good Governance*). Pengembangan tersebut dapat terwujud apabila seluruh OPD mampu menyusun perencanaan dan melaporkan hasil pekerjaan dengan baik dan terukur yang disusun menjadi Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) sesuai dengan Permenpan dan RB nomor 53 Tahun 2014. Adapun dasar-dasar terselenggaranya "*Good Governance*" yaitu Tap MPR RI No. XI/1998 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas KKN, Undang - Undang No. 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas KKN, serta Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Akuntabilitas adalah salah satu tonggak penting era reformasi. UU Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme menyatakan Akuntabilitas sebagai salah satu asas umum dalam penyelenggaraan negara. Azas akuntabilitas ini menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Laporan Kinerja merupakan wujud pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi beserta kewenangan pengolahan sumber daya dan juga sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja selama kurun waktu satu tahun anggaran. Dalam rangka pemenuhan prinsip akuntabilitas kinerja tersebut, Dinas Kesehatan menyusun LKjIP tahun 2025. Laporan Kinerja Dinas Kesehatan merupakan tolak ukur keberhasilan dalam pelaksanaan program kebijakan dan pengembangan kesehatan masyarakat. Informasi yang diharapkan dari Laporan Kinerja adalah penyelenggaraan pemerintahan yang dilakukan secara efisien, efektif dan responsif terhadap masyarakat, sehingga menjadi masukan dan umpan balik bagi pihak-pihak yang berkepentingan serta dapat menjaga kepercayaan masyarakat terhadap eksistensi suatu lembaga.

1.2 Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Laporan Akuntabilitas Kinerja Satuan Kerja Pemerintah Daerah Dinas Kesehatan Kabupaten Tabanan Tahun 2025 adalah melaksanakan Peraturan Pemerintah Nomor 08 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Adapun tujuannya yaitu mempertanggungjawabkan kinerja/pencapaian tujuan dan sasaran OPD Dinas Kesehatan Kabupaten Tabanan dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi serta Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Dinas Kesehatan Kabupaten Tabanan kepada pihak-pihak yang berkepentingan (*Stakeholder*) guna mewujudkan pemerintahan yang baik (*good governance*).

1.3 Landasan Hukum

LKjIP Dinas Kesehatan Kabupaten Tabanan Tahun 2025 disusun berdasarkan beberapa landasan sebagai berikut :

- (1). Landasan Idiil yaitu Pancasila,
- (2). Landasan Konstitusional yaitu UUD 1945,
- (3). Landasan Operasional :
 - a. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2000 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 75; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 - b. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 ; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 - c. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 - d. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 66; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

- e. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- f. Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- g. Undang-undang Nomor 79 Tahun 2024 tentang Kabupaten Tabanan di Provinsi Bali;
- h. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
- i. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
- j. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
- k. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- l. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
- m. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024, tentang Standar Teknis Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan;
- n. Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 1 Tahun 2024, tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
- o. Peraturan Bupati Tabanan Nomor 30 tahun 2024, Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 68 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah.

1.4 Analisis Aspek Strategis

Aspek strategis adalah aspek yang mendukung dan merupakan sumber daya dalam upaya mencapai sasaran dan tujuan menuju perwujudan visi dan misi Dinas kesehatan Kabupaten Tabanan, aspek-aspek tersebut antara lain :

1.4.1 Aspek Sumber Daya Manusia

Berdasarkan data bulan Desember 2025 jumlah pegawai yang ada di Dinas Kesehatan Kabupaten Tabanan termasuk Puskesmas, UPT Labkesda, dan UPT Gudang Farmasi adalah 1368 orang yang terdiri dari 1218 orang ASN dan 150 orang pegawai kontrak dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 1.1

Distribusi pegawai menurut Jenis kepegawaian dan golongan Tahun 2025

Jenis Kelamin	Kontrak	ASN	Jumlah
Laki laki	66	226	292
Perempuan	84	992	1076
Jumlah	150	1218	1368

Sumber : Sub.Bag Umum Dinas Kesehatan Kabupaten Tabanan, Tahun 2025

Jabatan fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu. Berikut merupakan distribusi pegawai di Dinas Kesehatan Kabupaten Tabanan, Puskesmas, UPT Labkesda, dan UPT Gudang Farmasi menurut Jenis Jabatan fungsional :

Tabel 1.2 Distribusi pegawai menurut Jenis Fungsional Tahun 2025

No	Jenis Fungsional	Jumlah
1	Dokter Umum	48
2	Dokter Gigi	27
3	Apoteker	11
4	Administrator Kesehatan	15
5	Epidemiolog Kesehatan	4
6	Penyuluh Kesehatan	6
7	Bidan	235
8	Perawat	120
9	Perawat Gigi	32
10	Pranata Laboratorium Kesehatan	11
11	Sanitarian	25
12	Ahli Gizi	25

No	Jenis Fungsional	Jumlah
13	Asisten Apoteker	28
14	Perekam Medis	3
15	Teknisi Elektromedis	1
Jumlah		591

Sumber : Sub.Bag Umum Dinas Kesehatan Kabupaten Tabanan, Tahun 2025

1.4.2 Aspek Sarana Pelayanan Kesehatan

Sarana kesehatan adalah tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya kesehatan. Berikut merupakan sarana yang tersedia di Dinas Kesehatan Kabupaten Tabanan :

Tabel 1.3

Jenis dan Jumlah Sarana Kesehatan Di Kabupaten Tabanan Tahun 2025

No	Jenis Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah
1	RUMAH SAKIT UMUM	8
2	RUMAH SAKIT KHUSUS	2
3	PUSKESMAS RAWAT INAP	5
4	PUSKESMAS NON RAWAT INAP	15
5	PUSKESMAS KELILING	22
6	PUSKESMAS PEMBANTU	77
7	POSKEDES	56
8	POLINDES	0
9	KLINIK PRATAMA	15
10	KLINIK UTAMA	6
11	LABORATORIUM KESEHATAN	3
12	UNIT TRANSFUSI DARAH	1

*Sumber : Bidang Pelayanan dan Sumber Daya Kesehatan, Kabupaten Tabanan
Tahun 2025*

1.4.3 Aspek Pembiayaan Kesehatan

Anggaran belanja Dinas Kesehatan Kabupaten Tabanan (termasuk Puskesmas, UPT Labkesda, dan UPT Gudang Farmasi) Tahun 2025 adalah Rp. 304.674.640.393,00 nilai tersebut sudah termasuk belanja operasi dan belanja modal pada Dinas Kesehatan, UPT Labkesda, dan UPT Gudang Farmasi Kabupaten Tabanan.

Tabel 1.4
Alokasi Pembiayaan Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Tabanan
Tahun 2025

No	Sumber Dana	Alokasi Anggaran	
		Rupiah	(%)
1	APBD Kabupaten Tabanan		
	a. Belanja Operasi	300.180.781.213,00	98,5%
	b. Belanja Modal	4.493.859.180,00	1,5%
TOTAL		304.674.640.393,00	100,00%

Sumber : Sub.Bag Keuangan Dinas Kesehatan Kabupaten Tabanan Tahun 2025

1.4.4 Aspek Wilayah

Secara geografis Kabupaten Tabanan berada pada posisi 08⁰14'30" sampai 08⁰38'07" Lintang Selatan dan 114⁰54'52" sampai 115⁰12'57" Bujur Timur. Wilayah ini cukup strategis karena berdekatan dengan Ibu Kabupaten Tabanan Provinsi Bali yang hanya berjarak sekitar 25 Km dengan waktu tempuh ± 45 menit dan dilalui oleh jalur arteri yaitu jalur antar propinsi. Secara administratif Kabupaten Tabanan terbagi atas 10 kecamatan dan 133 desa. Sepuluh Kecamatan yang dimaksud adalah Tabanan, Kerambitan, Selemadeg, Selemadeg Barat, Selemadeg Timur, Pupuan, Penebel, Marga, Baturiti, dan Kediri.

Luas Kabupaten Tabanan adalah 839,33 km² atau sekitar 14,90 % dari luas Propinsi Bali (5.632,86 km²). Berdasarkan besarnya wilayah, maka Kabupaten Tabanan termasuk kabupaten terbesar kedua di Provinsi Bali setelah Kabupaten Buleleng.

Keadaan topografi Kabupaten Tabanan dapat digambarkan dengan adanya dataran tinggi di bagian utara wilayah Tabanan, dan dataran rendah di bagian selatannya. Kabupaten Tabanan bagian utara merupakan daerah pegunungan dengan ketinggian tertinggi berada pada puncak Gunung Batukaru, yaitu 2.276

meter dari permukaan laut, dan di bagian selatan Kabupaten Tabanan merupakan daerah pantai yang berupa dataran rendah.

Bila dilihat dari penguasaan tanahnya, dari luas wilayah yang ada, sekitar 62,455 Ha (74,41%) wilayah Kabupaten Tabanan merupakan lahan pertanian, yang terdiri dari lahan sawah sebesar 22.184 Ha (26,43 %) dan 40,271 Ha (47,98%) merupakan lahan pertanian bukan sawah, yang sebagian besar berupa perkebunan, tegal, hutan rakyat, dan lainnya (tambak, kolam, empang, dll). Sedangkan 25,59 % lahan lainnya di Kabupaten Tabanan merupakan lahan bukan pertanian, seperti jalan, pemukiman, perkantoran, sungai dan lain-lain.

Luasnya Kabupaten Tabanan juga didukung dengan adanya fasilitas pelayanan kesehatan yang tersebar baik Puskesmas, Puskemas Pembantu maupun Poskesdes. Pada tahun 2025 terdapat 20 Puskesmas yang tersebar di masing masing kecamatan di Kabupaten Tabanan. Ke-20 Puskesmas juga didukung dengan adanya 77 buah Puskesmas Pembantu dan 56 buah Poskesdes yang tersebar di wilayah kerja Puskemas. Diharapkan dengan adanya fasilitas pelayanan kesehatan tersebut dapat memudahkan akses masyarakat untuk mendapatkan pelayanan kesehatan.

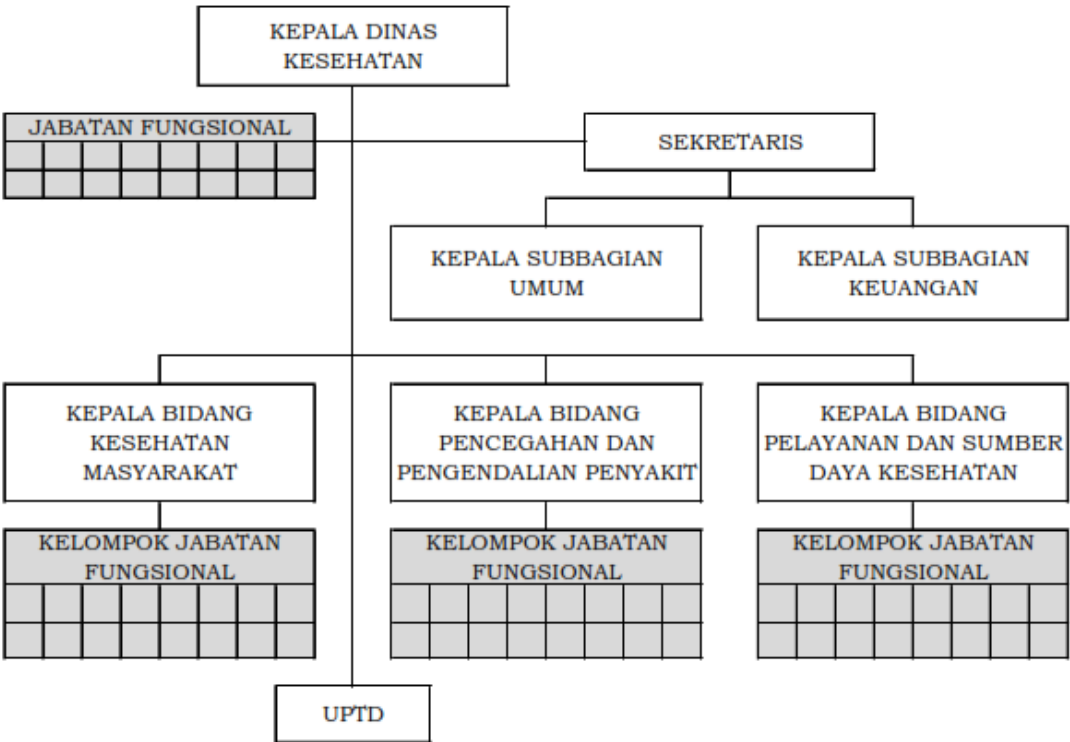
1.5 Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Pejabat Dinas Kesehatan

Dinas Kesehatan Kabupaten Tabanan, dipimpin oleh seorang Kepala Dinas, dibantu oleh seorang Sekretaris dan tiga orang Kepala Bidang, yaitu masing-masing dari Bidang Pelayanan Kesehatan dan Sumber Daya Kesehatan, Bidang Kesehatan Masyarakat, Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit. Sekretaris membawahi dua sub bagian dan Kepala Bidang membawahi tiga orang Kepala Seksi. Disamping itu Dinas Kesehatan Kabupaten Tabanan memiliki 22 Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) yaitu 20 UPTD Puskesmas, UPTD Instalasi Farmasi, UPTD Laboratorium Kesehatan dan Kalibrasi, serta 2 rumah sakit yakni Rumah Sakit Umum Daerah Tabanan dan Rumah Sakit Umum Singasana. Dalam memimpin UPTD, Ka. UPTD dibantu masing-masing oleh seorang Kepala Sub Bagian Tata Usaha sedangkan Rumah Sakit di Nyitdah dengan tipe C dikepalai oleh seorang Direktur dan dibantu oleh Kepala Bagian Tata Usaha serta dua Kepala Bidang. Kepala Bagian Tata Usaha membawahi dua sub bagian dan masing masing Kepala Bidang membawahi dua seksi. Selain itu Rumah Sakit Umum Daerah Tabanan dipimpin oleh seorang Direktur yang dibantu 3 orang Wakil Direktur yakni Wadir Pelayanan dan Pengendalian Mutu, Wadir

Penunjang, dan Wadir Operasional. Masing masing Wadir membawahi 2 bidang, sedangkan masing masing bidang membawahi 2 seksi.

Tugas Dinas Kesehatan Kabupaten Tabanan sesuai dengan Peraturan Bupati No. 30 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah. Dinas Kesehatan Kabupaten Tabanan dengan Tipe B, bertugas menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan. Dinas Kesehatan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Bagan 1.1
Struktur Organisasi PD Dinas Kesehatan Kabupaten Tabanan



Sumber : Sub.Bag Umum Dinas Kesehatan Kabupaten Tabanan Tahun 2025

Adapun rincian uraian tugas Dinas Kesehatan Kabupaten Tabanan, antara lain :

Adapun rincian uraian tugas Dinas Kesehatan Kabupaten Tabanan, antara lain :

1. Kepala Dinas Kesehatan mempunyai tugas:
 - a. memimpin dan mengkoordinasikan perumusan rencana dan program kerja dinas kesehatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;

- b. perumusan kebijakan, fasilitasi dan koordinasi pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat;
- c. perumusan kebijakan, fasilitasi dan koordinasi peningkatan kapasitas sumber daya manusia kesehatan;
- d. perumusan kebijakan, fasilitasi dan koordinasi sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan minuman.
- e. perumusan kebijakan, fasilitasi dan koordinasi pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan;
- f. monitoring, evaluasi pelaksanaan dan capaian kinerja dinas kesehatan;
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan; dan
- h. melaporkan hasil kegiatan kepada atasan sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban

2. Sekretaris mempunyai tugas:

- a. koordinasi dan penyusunan rencana, program, kegiatan, dan anggaran;
- b. pengelolaan dan penyusunan laporan keuangan;
- c. pengelolaan dan penyusunan laporan barang milik daerah;
- d. fasilitasi pelaksanaan pengelolaan satuan kerja badan layanan umum daerah;
- e. penyusunan peraturan perundang-undangan, penyusunan rumusan perjanjian kerja sama, dan pelaksanaan advokasi hukum;
- f. koordinasi dan fasilitasi pengawasan dan penyidikan pelaksanaan kebijakan di bidang kesehatan;
- g. penataan dan evaluasi organisasi dan tata laksana serta fasilitasi implementasi reformasi birokrasi;
- h. pengelolaan sumber daya manusia di lingkungan Dinas Kesehatan Daerah;
- i. pengelolaan hubungan masyarakat;
- j. pengelolaan data dan sistem informasi;
- k. koordinasi dan pengelolaan fungsi lintas bidang;
- l. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan; dan
- m. pelaksanaan urusan administrasi Dinas Kesehatan Daerah.

2.1 Kepala Sub Bagian Umum mempunyai tugas:

- a. menyusun program kerja subbagian umum;
- b. melaksanakan pengelolaan urusan tata usaha (persuratan, dokumentasi dan kearsipan);

- c. melaksanakan pengelolaan perlengkapan, urusan rumah tangga, barang milik negara/daerah, keamanan dan ketertiban kantor;
- d. melaksanakan urusan kepegawaian dan pembinaan aparatur;
- e. menyiapkan bahan penanganan pengaduan masyarakat dan pelayanan publik;
- f. menyiapkan bahan pelaksanaan reformasi birokrasi;
- g. menyiapkan bahan sistem pengendalian intern pemerintah;
- h. melaksanakan fungsi publikasi dan hubungan masyarakat;
- i. menyusun laporan pelaksanaan kegiatan subbagian umum; dan
- j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

2.2 Kepala Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas:

- a. menyusun program kerja sub bagian keuangan;
- b. menyusun perencanaan, program dan anggaran dinas kesehatan;
- c. menyiapkan koordinasi pengelolaan keuangan;
- d. melaksanakan penatausahaan keuangan;
- e. menyiapkan bahan pelaksanaan pengendalian kegiatan dan anggaran;
- f. menyiapkan bahan tanggapan pemeriksaan keuangan;
- g. menyiapkan bahan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan;
- h. menyusun laporan pelaksanaan kegiatan sub bagian keuangan; dan
- i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

3. Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat mempunyai tugas:

- a. pelaksanaan integrasi layanan primer berbasis siklus hidup;
- b. pelaksanaan komunikasi, informasi, dan edukasi, perilaku, dan determinannya dalam upaya promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat, advokasi program, dan penggalangan kemitraan;
- c. pelaksanaan surveilans kesehatan, deteksi dini, dan pengendalian faktor risiko bidang gizi masyarakat dan kesehatan masyarakat berdasarkan siklus hidup;
- d. pelaksanaan skrining, penemuan kasus dan faktor risiko, investigasi, dan pengendalian populasi dan/atau faktor risiko kesehatan bidang gizi masyarakat dan kesehatan masyarakat berdasarkan siklus hidup;
- e. pemberian intervensi, peningkatan akses, penyediaan sumber daya, dan peningkatan kualitas pelayanan di bidang gizi masyarakat dan kesehatan masyarakat berdasarkan siklus hidup;

- f. fasilitasi tata kelola manajemen pelayanan kesehatan masyarakat;
 - g. pelaksanaan integrasi dan kolaborasi pelayanan kesehatan di Puskesmas dan fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama lainnya;
 - h. fasilitasi pelayanan kesehatan masyarakat pada kawasan khusus termasuk daerah terpencil, sangat terpencil, perbatasan, dan kepulauan;
 - i. penyelenggaraan upaya kesehatan kerja, kesehatan olah raga, dan kesehatan tradisional;
 - j. penyelenggaraan upaya kesehatan jiwa;
 - k. perencanaan dan penjaminan mutu penyelenggaraan laboratorium kesehatan masyarakat;
 - l. pengawasan dan penyidikan pelaksanaan kebijakan di bidang kesehatan masyarakat;
 - m. pemberian bimbingan teknis pada UPTD Dinas Kesehatan Daerah; dan
 - n. pengelolaan jabatan fungsional bidang kesehatan masyarakat.
4. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit mempunyai tugas:
- a. pelaksanaan surveilans, deteksi dini, pengendalian faktor risiko, dan koordinasi upaya pencegahan dan pengendalian penyakit;
 - b. pelaksanaan respon Kejadian Luar Biasa (KLB), wabah, dan bencana;
 - c. pelaksanaan kemitraan dalam rangka pencegahan dan pengendalian penyakit;
 - d. advokasi pencegahan faktor risiko dalam rangka pencegahan dan pengendalian penyakit;
 - e. pelaksanaan imunisasi rutin, imunisasi dewasa, dan imunisasi khusus;
 - f. pelaksanaan dan koordinasi hasil surveilans Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi (KIPI);
 - g. koordinasi pelaksanaan laboratorium surveilans pencegahan dan pengendalian penyakit dengan laboratorium kesehatan masyarakat;
 - h. pengembangan inovasi/teknologi tepat guna yang mendukung upaya pencegahan dan pengendalian penyakit;
 - i. pelaksanaan kesehatan lingkungan, meliputi surveilans faktor risiko, penyehatan air dan sanitasi dasar, penyehatan pangan, penyehatan udara, tanah, dan kawasan, dan pengamanan limbah, serta adaptasi perubahan iklim dan kebencanaan;

- j. pelaksanaan deteksi dini dan respon/penanggulangan KLB/wabah, pencegahan dan pengendalian penyakit serta kesehatan lingkungan pada situasi khusus seperti pada penyelenggaraan ibadah haji dan umroh;
 - k. pengawasan dan penyidikan pelaksanaan kebijakan di bidang pencegahan dan pengendalian penyakit;
 - l. pemberian bimbingan teknis pada UPTD Dinas Kesehatan Daerah; dan
 - m. pengelolaan jabatan fungsional bidang pencegahan dan pengendalian penyakit.
5. Kepala Bidang Pelayanan dan Sumber Daya Kesehatan mempunyai tugas:
- a. pengelolaan tata laksana pelayanan klinis, pelayanan penunjang, kegawatdaruratan, pengelolaan perizinan pelayanan kesehatan, dan fasilitas pelayanan kesehatan, serta pelayanan kesehatan khusus lainnya;
 - b. fasilitasi tata kelola manajemen pelayanan kesehatan lanjutan;
 - c. pengelolaan audit medis/audit klinis rumah sakit dan pelaksanaan standar pelayanan kesehatan lanjutan pada program jaminan kesehatan;
 - d. pemberian dukungan pelayanan kesehatan pada penyelenggaraan mudik lebaran dan hari besar keagamaan, kegawatdaruratan pra rumah sakit, kumpulan massa (mass gathering), dan situasi khusus lainnya;
 - e. fasilitasi pelaksanaan akreditasi dan peningkatan mutu pelayanan dan keselamatan pasien di fasilitas pelayanan kesehatan;
 - f. pengelolaan pengampuan rumah sakit dan wahana pendidikan;
 - g. pelaksanaan sertifikasi dan penilaian kesesuaian sarana produksi dan/atau distribusi sediaan farmasi, alat kesehatan, dan/atau perbekalan kesehatan rumah tangga;
 - h. pengelolaan kebutuhan sediaan farmasi dan alat kesehatan;
 - i. pengelolaan manajemen kefarmasian dan pelayanan farmasi klinis;
 - j. pengawasan produk dan sarana produksi dan/atau distribusi alat kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah tangga;
 - k. pengembangan dan penguatan tata kelola rantai pasok sediaan farmasi dan alat kesehatan;
 - l. peningkatan penggunaan produk sediaan farmasi dan alat kesehatan dalam negeri;
 - m. pengelolaan pendanaan kesehatan;

- n. perencanaan, pengadaan, serta pendayagunaan tenaga medis dan tenaga kesehatan;
- o. peningkatan mutu dan kompetensi tenaga medis dan tenaga kesehatan;
- p. pelaksanaan urusan kesejahteraan dan perlindungan tenaga medis dan tenaga kesehatan;
- q. pendayagunaan dan pelaksanaan urusan kesejahteraan tenaga pendukung atau penunjang kesehatan;
- r. pengawasan dan penyidikan pelaksanaan kebijakan di bidang pelayanan kesehatan dan sumber daya kesehatan;
- s. pemberian bimbingan teknis pada UPTD Dinas Kesehatan Daerah; dan
- t. pengelolaan jabatan fungsional bidang pelayanan kesehatan dan bidang sumber daya kesehatan.

1.6 Isu-isu Strategis

Berdasarkan atas permasalahan yang telah diurai pada sub bab sebelumnya serta sinergis dengan kebijakan pemerintah pusat dan provinsi dengan adanya transisi epidemiologi penyakit menular yang bersifat global, penentuan isu-isu strategis dan rumusannya mengacu pada permasalahan dan kebutuhan pelayanan dibidang Kesehatan saat ini. Sehingga isu-isu strategis yang dihadapi dalam pembangunan Kabupaten Tabanan dibidang Kesehatan kedepan sesuai dengan Pola Pembangunan Semesta Berencana adalah antara lain :

1. Rendahnya kepesertaan Aktif JKN
2. Kesenjangan Mutu dan Kualitas Fasilitas Pelayanan Kesehatan
3. Kesenjangan Kualitas dan Ketersediaan Tenaga Kesehatan.
4. Sebagian besar Puskesmas pembantu dalam kondisi rusak sedang dan berat
5. Kalibrasi alat kesehatan tidak terlaksana secara rutin
6. Tingginya Prevalensi Stunting dan Masalah Gizi Lainnya
7. Masih adanya kematian ibu dan bayi
8. Masih ditemukannya penularan penyakit menular (TBC, HIV AIDS, DBD, Kusta) dan adanya peningkatan penduduk yang menderita penyakit tidak menular (Hipertensi, Diabetes Melitus, Kanker, Jantung).

9. Belum optimalnya perilaku hidup bersih dan sehat
10. Rujukan non spesialis dari puskesmas masih tinggi

1.7 Sistematika Penyajian

Pada dasarnya laporan akuntabilitas kinerja ini memberikan penjelasan mengenai pencapaian kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Tabanan selama Tahun 2025. Capaian kinerja (*performance results*) Tahun 2025 tersebut dibandingkan dengan perjanjian kinerja (*performance agreements*) Tahun 2025 sebagai tolok ukur keberhasilan tahunan organisasi. Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja ini akan memungkinkan diidentifikasinya sejumlah celah kinerja (*performance gap*) bagi perbaikan kinerja di masa datang. Sistematika penyajian LKjIP Kabupaten Tabanan Tahun 2025 berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, sebagai berikut :

- Bab I–Pendahuluan : Memberikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (*strategic issued*) yang sedang dihadapi organisasi.
- Bab II–Perencanaan Kinerja, menguraikan ringkasan/ ikhtisar perjanjian kinerja Dinas Kesehatan tahun 2025.
- Bab III–Akuntabilitas Kinerja Tahun 2025,
 - a. Capaian Kinerja Organisasi, menyajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis Dinas Kesehatan sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi.
 - b. Realisasi Anggaran, menguraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.
- Bab IV–Penutup, menguraikan simpulan umum atas capaian kinerja Dinas Kesehatan serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan Dinas Kesehatan untuk meningkatkan kinerjanya.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, menyebutkan bahwa perencanaan strategis merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul. Proses ini menghasilkan suatu rencana strategis yang setidaknya memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program, kegiatan, kebutuhan anggaran serta target pencapaiannya.

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi yang efektif, efisien dan akuntabel, diperlukan adanya pedoman dan dokumen perencanaan. Adapun pedoman yang akan dijadikan acuan di Dinas Kesehatan Kabupaten Tabanan adalah sebagai berikut :

1. RPJMD 2021-2026.
2. Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Tabanan Tahun 2021-2026.
3. Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) Tahun 2025
4. Indikator Kinerja Utama Dinas Kesehatan.
5. Rencana Kinerja Dinas Kesehatan Tahun 2025.
6. Perjanjian Kinerja Dinas Kesehatan Tahun 2025.
7. Pengukuran Kinerja Dinas Kesehatan Tahun 2025.

2.1 Rencana Strategis Tahun 2021-2026

RPJMD Kabupaten Tabanan telah tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Kabupaten Tabanan Tahun 2021-2026 yaitu merupakan dokumen perencanaan pembangunan pemerintah daerah yang dirancang selama satu periode masa kepemimpinan Kepala Daerah / Bupati terpilih.

RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Tabanan 2021-2026 merupakan penjabaran visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih hasil Pilkada serentak tahun 2020 yang telah resmi dilantik pada tanggal 26 Februari 2021. I Komang Gede Sanjaya sebagai Bupati dan I Made Edi Wirawan sebagai Wakil Bupati untuk

memimpin Tabanan dalam tiga tahun ke depan, periode 2021-2024. Selanjutnya pada Tahun 2025 merupakan tahun pelantikan bagi Bupati dan Wakil Bupati periode 2025-2029 yakni I Komang Gede Sanjaya sebagai Bupati dan I Made Dirga sebagai Wakil Bupati. Sekaligus merupakan tahun penyusunan RPJMD bagi Kabupaten dan Renstra bagi perangkat daerah. Untuk itu, Laporan LKJIP tahun 2025 masih mengacu pada RPJMD dan Renstra periode 2021-2026.

Visi “Nangun Sat Kerthi Loka Bali Melalui Pola Pembangunan Semesta Berencana di Kabupaten Tabanan Menuju Tabanan Era Baru : Aman, Unggul, Madani (AUM)”. AMAN bermakna untuk mewujudkan masyarakat Tabanan yang aman dan nyaman dalam perikehidupan. UNGGUL bertujuan untuk membangun masyarakat Tabanan yang memiliki kemampuan dan berdaya saing tinggi di segala bidang kehidupan, serta MADANI adalah mewujudkan masyarakat Tabanan yang memiliki kemandirian secara sosial-ekonomi di berbagai bidang yang berkepribadian dalam kebudayaan. Untuk mewujudkan Visi Nangun Sat Kerthi Loka Bali Melalui Pola Pembangunan Semesta Berencana di Kabupaten Tabanan Menuju Tabanan Era Baru : Aman, Unggul, Madani (AUM)

1. Mewujudkan Masyarakat Tabanan Yang Aman Dan Nyaman Dalam Perikehidupan (Aman)
2. Membangun Masyarakat Tabanan Yang Memiliki Kemampuan Dan Berdaya Saing Tinggi Di Segala Bidang Kehidupan (Unggul)
3. Mewujudkan Masyarakat Tabanan Yang Memiliki Kemandirian Secara Sosial-Ekonomi Di Berbagai Bidang Yang Berkepribadian Dalam Kebudayaan (MADANI)

Pelaksanaan pembangunan Tabanan dalam mewujudkan Visi Misi didasarkan atas 5 (lima) bidang prioritas yaitu :

1. Pangan, Sandang, dan Papan
2. Kesehatan dan Pendidikan
3. Jaminan Sosial dan Ketenagakerjaan
4. Adat, Tradisi, Seni dan Budaya
5. Pariwisata.

Kelima bidang di atas membutuhkan dukungan infrastruktur fisik maupun elektronik yang memadai dan tetap menjaga kelestarian dan kualitas lingkungan hidup yang memadai. Selaras dengan Pembangunan Semesta Berencana Bali, yang berlandaskan nilai-nilai kearifan lokal Bali Sad Kerthi yaitu 6 (enam)

sumber utama kesejahteraan dan kebahagiaan kehidupan masyarakat Bali, meliputi penyucian jiwa (atma kerthi), penyucian laut (segara kerthi), penyucian sumber air (danu kerthi), penyucian tumbuh-tumbuhan (wana kerthi), penyucian manusia (jana kerthi) dan penyucian alam semesta (jagat kerthi) serta landasan filosofi Tri Hita Karana yaitu hubungan harmonis antara manusia dengan Tuhan, manusia dengan manusia dan manusia dengan alam. Pembangunan Semesta Berencana Tabanan menempatkan Sad Kerthi sebagai pondasi pembangunannya.

Dengan mengacu pada Tujuan dan sasaran tersebut dan mensinergikan isu-isu strategis dan prioritas pembangunan Kesehatan yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Tabanan maka Dinas Kesehatan merumuskan Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kesehatan di Kabupaten Tabanan dalam Renstra Dinas Kesehatan periode 2021-2026 selaras dengan tujuan dan sasaran RPJMD menjadi 2 Tujuan dan 2 sasaran yaitu :

- Tujuan 1 : Terwujudnya Pemenuhan Hak Dasar Kesehatan dengan
 - o Sasaran 1 : Meningkatnya sumber daya kesehatan sesuai standar
- Tujuan 2 : Terwujudnya kualitas tata kelola pemerintahan di OPD dengan
 - o Sasaran 2 : Meningkatnya kinerja perangkat daerah.

2.2 Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia nomor 53 tahun 2014 menyebutkan bahwa, Perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (*outcome*) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup

outcome yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Perjanjian Kinerja Tahun 2025 Dinas Kesehatan adalah pernyataan komitmen pimpinan sebagai penerima amanah untuk mewujudkan janji mencapai kinerja tertentu yang telah disepakati bersama. Perjanjian kinerja tahun 2025 juga merupakan penjabaran dari sasaran dan program tahun ke - 1 yang telah ditetapkan dalam RENSTRA PD Tahun 2021 – 2026, Dokumen Rencana Kinerja Tahun 2025 dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Tahun 2025. Perjanjian kinerja Tahun 2025 tersebut merupakan rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh Indikator Kinerja.

Adapun tujuan, sasaran strategis dan indikator kinerja Tahun 2025, dapat digambarkan pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.1 Sasaran Strategis, Perjanjian Kinerja dan Target Tahun 2025

No	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Difinisi Operasional /Formula	Target	Satuan
1.	Terwujudnya Pemenuhan Hak Dasar Kesehatan		Persentase rata-rata Capaian SPM Kesehatan	Rata-rata Capaian Standar Pelayanan Minimal Kesehatan di Fasilitas Kesehatan di Kabupaten Tabanan	100	persen
2.		Meningkatnya Sumber Daya Kesehatan sesuai standar	Persentase Sumber Daya Kesehatan yang terpenuhi sesuai standar	Jumlah sumber daya kesehatan yang terpenuhi sesuai standar pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan dibagi jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan	80	persen
3.	Terwujudnya kualitas tata kelola pemerintah di OPD		Hasil Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Hasil Evaluasi Inspektorat	A	Nilai PMPRB

No	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Difinisi Operasional /Formula	Target	Satuan
4.		Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah	Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Hasil Evaluasi Inspektorat	A	Nilai SAKIP

Berdasarkan indikator kinerja Dinas Kesehatan yang dijabarkan dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana (RPJMD-SB) ke dalam Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kesehatan tersebut diharapkan bernilai strategis dan memiliki daya ungkit yang tinggi bagi peningkatan kinerja Dinas Kesehatan dalam mendukung pencapaian VISI DAN MISI Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tabanan. Program-program yang dilaksanakan diharapkan dapat meningkatkan performa dan kinerja sesuai dengan tupoksinya adalah :

Tabel 2.2 Rincian Pendanaan Dinas Kesehatan Berdasarkan Program Pembangunan Tahun 2025

No	Program	Indikator	Difinisi Operasional / Formula	Target	Anggaran (Setelah Perubahan) (Rp)
1	2	3	4	5	6
1	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase Capaian Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Rata-rata capaian upaya pelayanan kesehatan perorangan dan upaya pelayanan kesehatan masyarakat	81%	71,600,218,454.00
2	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Persentase fasilitas kesehatan milik pemerintah Kabupaten Tabanan yang memiliki jenis dan jumlah SDM Kesehatan yang memenuhi	Jumlah faskes milik pemerintah yang memiliki jenis dan jumlah SDM Kesehatan yang memenuhi standar dalam satu tahun per jumlah Faskes di Kabupaten Tabanan dikali 100%	60%	1,243,884,000.00

No	Program	Indikator	Difinisi Operasional / Formula	Target	Anggaran (Setelah Perubahan) (Rp)
3	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	Persentase usaha farmasi, alat kesehatan dan makanan minuman yang memenuhi standar perijinan	Jumlah usaha farmasi, alat kesehatan dan makanan minuman yang memenuhi standar perijinan dibagi Jumlah usaha farmasi, alat kesehatan dan makanan minuman dikali 100%	70%	309,844,739.00
4	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Persentase Desa Siaga Madya	Desa yang memenuhi klasifikasi desa siaga madya dibandingkan dengan seluruh desa yang ada (Desa yang memenuhi klasifikasi desa siaga aktif madya dibagi dengan jumlah seluruh desa yang ada kali 100 persen)	36%	391,285,000.00
5	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi PD	Rata-rata capaian kegiatan penunjang urusan pemerintahan daerah Kabupaten Tabanan pada Dinas Kesehatan	100%	231,129,408,200.00
	TOTAL ANGGARAN				304,674,640,393.00

Adapun rincian kegiatan/ Sub Kegiatan setiap program tersebut adalah sebagai berikut :

- A. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
 1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - 1.1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - 1.2 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - 2.1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - 2.2 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD

- 2.3 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD
- 3. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
 - 3.1 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
- 4. Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - 4.1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - 4.2 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
 - 4.3 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - 4.4 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - 4.5 Penyediaan Bahan/Material
 - 4.6 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
 - 4.7 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
- 5 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - 5.1 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - 5.2 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
- 6 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - 6.1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 - 6.2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - 6.3 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- 7 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - 7.1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - 7.2 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- B. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat
 - 1. Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
 - 1.1 Pembangunan Puskesmas
 - 1.2 Pengembangan Puskesmas
 - 1.3 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas
 - 1.4 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya

- 1.5 Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan
- 1.6 Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan
- 1.7 Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas
2. Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
 - 2.1 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil
 - 2.2 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin
 - 2.3 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir
 - 2.4 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita
 - 2.5 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar
 - 2.6 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif
 - 2.7 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut
 - 2.8 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi
 - 2.9 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus
 - 2.10 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat
 - 2.11 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis
 - 2.12 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV
 - 2.13 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat
 - 2.14 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga
 - 2.15 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan
 - 2.16 Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan
 - 2.17 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya
 - 2.18 Pengelolaan Surveilans Kesehatan
 - 2.19 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA
 - 2.20 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular
 - 2.21 Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat
 - 2.22 Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasyankes dan Sekolah
 - 2.23 Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional
 - 2.24 Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat

- 2.25 Penyediaan Telemedicine di Fasilitas Pelayanan Kesehatan
- 2.26 Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya
- 2.27 Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota
- 2.28 Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)
- 2.29 Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah
- 2.30 Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)
- 2.31 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Tuberkulosis
- 2.32 Pengelolaan pelayanan Kesehatan Orang Dengan HIV (ODHIV)
- 2.33 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Malaria
- 2.34 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak
- 3. Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi
 - 3.1 Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan
- 4. Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
 - 4.1 Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya
 - 4.2 Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
 - 4.3 Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan
 - 4.4 Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan
- C. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan
 - 1. Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota
 - 1.1 Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan
 - 2. Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota
 - 2.1 Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan
 - 2.2 Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan
 - 3. Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

- 3.1 Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
- D. Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman
 1. Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)
 - 1.1 Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)
 2. Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga
 - 2.1 Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga
 3. Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan
 - 3.1 Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan
 4. Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga
 - 4.1 Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan
- E. Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan
 1. Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
 - 1.1 Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat
 2. Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
 - 2.1 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)

Untuk menggambarkan keterkaitan antara sasaran, indikator, program, kegiatan serta target-target yang ditetapkan, dapat dilihat pada tabel di bawah ini

Tabel 2.3. Sasaran, Indikator, Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan serta Target Kinerja dan Anggaran Dinas Kesehatan Tahun 2025

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TARGET	ANGGARAN
A	Terwujudnya kualitas tata kelola pemerintahan di OPD	Hasil evaluasi Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi PD	100%	231,129,408,200.00
1			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang dihasilkan	100%	4,862,000.00
			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	2,931,000.00
			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Dokumen	1,931,000.00
2			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi PD	100%	225,954,832,184.00
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	17524 Orang	225,947,657,184.00
			Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	4,738,000.00

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TARGET	ANGGARAN
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	4 Laporan	2,437,000.00
3			Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Laporan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang dihasilkan	100%	57,792,000.00
			Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Dokumen	57,792,000.00
4			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi PD	100%	266,674,800.00
			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	9,471,800.00
			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	3 Paket	20,000,000.00
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	43,013,000.00
			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	23,940,000.00

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TARGET	ANGGARAN
			Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket	125,476,000.00
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	15 Laporan	40,044,000.00
			Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Arsip Dinamis pada SKPD yang dilakukan penatausahaan	400 Dokumen	4,730,000.00
5			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang tersedia Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi PD yang	100%	169,971,600.00
			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Disediakan	8 Unit	49,971,600.00
			Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	8 Unit	120,000,000.00
6			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase administrasi perkantoran yang mendukung kelancartugas dan fungsi PD	100%	4,425,302,016.00
			Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	10,000,000.00

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TARGET	ANGGARAN
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	349,995,600.00
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	4,065,306,416.00
7			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dalam kondisi baik yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi PD	100%	249,973,600.00
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1 Unit	199,973,600.00
			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	60 unit	50,000,000.00
B	Terwujudnya Pemenuhan Hak Pelayanan Dasar Kesehatan	Persentase Sumber Daya Kesehatan yang terpenuhi sesuai standar	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Capaian Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	81%	71,600,218,454.00

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TARGET	ANGGARAN
1			Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan pemerintah yang mampu memberikan pelayanan kesehatan sesuai standar	100%	10,502,373,546.00
			Pembangunan Puskesmas	Jumlah Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) yang Dibangun	3 Unit	436,400,000.00
			Pengembangan Puskesmas	Jumlah Puskesmas yang ditingkatkan Sarananya Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar	5 Unit	2,406,692,000.00
			Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang telah dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Puskesmas	2 Unit	713,479,000.00
			Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Sarana , Prasarana dan Alat Kesehatan yang telah dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Fasilitas Kesehatan Lainnya	2 Unit	499,655,000.00
			Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar	520 Unit	217,658,240.00

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TARGET	ANGGARAN
			Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai,Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang tersedia	150 Paket	6,174,075,106.00
			Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan	Jumlah distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan ke Fasilitas Kesehatan	22 Paket	54,414,200.00
2			Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase jenis layanan kesehatan yang mampu dilayani secara prima	100%	60,986,080,408.00
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	4404 Orang	19,136,000.00
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	4204 Orang	210,168,000.00
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	4004 Orang	9,411,000.00

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TARGET	ANGGARAN
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	22434 Orang	9,403,000.00
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	52248 Orang	23,620,000.00
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	67814 Orang	28,845,000.00
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	57060 Orang	684,299,000.00
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	44850 Orang	7,308,000.00
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	5525 Orang	8,576,000.00
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	1016 Orang	15,127,000.00

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TARGET	ANGGARAN
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	1994 Orang	168,550,000.00
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	5431 Orang	273,174,700.00
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	1 Dokumen	14,251,800.00
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	1 Dokumen	55,316,000.00
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	1 Dokumen	121,772,760.00
			Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	1 Dokumen	167,838,100.00
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	1 Dokumen	9,505,000.00
			Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	3 Dokumen	91,304,000.00

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TARGET	ANGGARAN
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	11 Orang	4,278,000.00
			Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	1 Dokumen	2,460,189,600.00
			Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	4 Dokumen	54,635,787,398.00
			Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasyankes dan Sekolah	Jumlah Orang yang Menerima Layanan Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) dan Sekolah	309791 Orang	239,184,000.00
			Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan	1 Paket	182,132,000.00
			Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	1 Dokumen	38,620,000.00
			Penyediaan Telemedicine di Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) yang Melayani Konsultasi Jarak Jauh antar Fasyankes Melalui Pelayanan Telemedicine untuk Mendapatkan Akses	5 Unit	14,664,000.00

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TARGET	ANGGARAN
				Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas		
			Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	1 Dokumen	814,356,150.00
			Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota	21 Unit	16,063,000.00
			Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	1 Laporan	4,856,000.00
			Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	1 Dokumen	57,584,000.00
			Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	Jumlah Public Safety Center (PSC 119) Tersediaan, Terkelolaan dan Terintegrasi Dengan Rumah Sakit Dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	1 Unit	23,791,000.00
			Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	551 orang	4,240,000.00

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TARGET	ANGGARAN
			Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	1456 orang	4,240,000.00
			Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria	589 orang	29,241,000.00
			Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	1 Dokumen	539,248,900.00
3			Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang menyelenggarakan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi	100%	48,148,500.00
			Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	1 Dokumen	48,148,500.00
4			Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Fasilitas Kesehatan yang memenuhi standar perizinan	55%	63,616,000.00
			Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya	Jumlah Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Dikendalikan, Diawasi dan Ditindaklanjuti Perizinannya	25 Unit	9,520,000.00

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TARGET	ANGGARAN
			Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Melakukan Peningkatan Tata Kelola Sesuai Standar	25 Unit	16,175,000.00
			Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan kesehatan	25 Unit	23,689,000.00
			Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan	Jumlah Dokumen Hasil Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan	1 Dokumen	14,232,000.00
C			PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase fasilitas kesehatan milik pemerintah Kabupaten Tabanan yang memiliki jenis dan jumlah SDM Kesehatan yang memenuhi standar	60%	1,243,884,000.00
1			Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota	Persentase Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota	88%	9,568,000.00
			Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	1 Dokumen	9,568,000.00

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TARGET	ANGGARAN
2			Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	Persentase Fasilitas Kesehatan Milik Pemerintah Kabupaten Tabanan yang memiliki dokumen perencanaan Kebutuhan SDM berdasarkan analisis beban kerja	100%	147,002,000.00
			Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan	24 Dokumen	9,682,000.00
			Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	1 Dokumen	137,320,000.00
3			Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase tenaga kesehatan yang memiliki STR	100%	1,087,314,000.00
			Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya	100 orang	1,087,314,000.00

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TARGET	ANGGARAN
D			PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Persentase Usaha farmasi, alat kesehatan dan makanan minuman yang memenuhi standar perijinan	70%	309,844,739.00
1			Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Persentase Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) yang memiliki ijin sesuai standar	70%	84,617,739.00
			Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional(UMOT)	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	40 Dokumen	84,617,739.00
2			Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor PIRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Persentase Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga yang bersertifikat	75%	14,310,000.00

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TARGET	ANGGARAN
			Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor PIRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor PIRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	1 Dokumen	14,310,000.00
3			Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	Persentase Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan yang mendapatkan stiker Pembinaan	78%	16,540,000.00
			Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	1 Dokumen	16,540,000.00
4			Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga	Persentase Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga yang dilakukan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut	70%	194,377,000.00

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TARGET	ANGGARAN
			Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan	Jumlah Produk dan Sarana Produksi Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga Beredar yang Dilakukan Pemeriksaan Post Market dalam rangka Tindak Lanjut Pengawasan	40 Unit	194,377,000.00
E			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase Desa Siaga Madya	36%	391,285,000.00
1			Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kebijakan Publik yang di buat di bidang kesehatan	1 Dokumen	363,285,000.00
			Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	3 Dokumen	363,285,000.00
2			Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat UKBM Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) yang dikembangkan	75%	28,000,000.00

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TARGET	ANGGARAN
			Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	1 Dokumen	28,000,000.00
	Total Anggaran					304,674,640,393.00

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Kerangka Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi instansi pemerintah.

Pengukuran tingkat capaian kinerja Pemerintah Kabupaten Tabanan tahun 2025 dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi masing-masing indikator kinerja sasaran. Secara terperinci hal ini diuraikan secara nyata pada analisis capaian kinerja, sebagai upaya pengembangan sistem akuntabilitas kinerja sekaligus sebagai pelaksanaan amanah dari Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara. Pengukuran kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Tabanan Tahun 2025 dilakukan melalui tahapan-tahapan sebagai berikut:

3.1.1 Penetapan Kinerja

Dokumen Penetapan kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Tabanan yang berisi indikator dan target kinerja yang telah ditetapkan pada awal tahun anggaran setelah penetapan APBD 2025 yang menjadi acuan dalam pengukuran kinerja. Penetapan kinerja tersebut mencakup penetapan indikator kinerja dan target kinerja berdasarkan sasaran strategis yang akan dilaksanakan pada tahun tersebut (tahun ke N) sesuai dengan RPJMD.

3.1.2 Pengumpulan Data Kinerja.

Pengumpulan data kinerja pada Dinas Kesehatan Kabupaten Tabanan dilakukan melalui sistem informasi kinerja yang mengintegrasikan data kinerja dengan data realisasi kinerja. Pengumpulan data mencakup realisasi seluruh indikator kinerja yang ditetapkan dalam dokumen Penetapan perjanjian Kinerja tahun 2025. Hasil pengumpulan data kinerja tersebut kemudian dievaluasi

berdasarkan target dalam dokumen Penetapan Perjanjian Kinerja dan dituangkan dalam form Pengukuran Kinerja yang selanjutnya menjadi lampiran dalam LKjIP. Dari hasil evaluasi dapat diketahui kinerja yang mencapai dan yang tidak mencapai target untuk kemudian dilakukan analisis faktor-faktor yang mendukung dan atau yang menghambat pencapaian kinerja.

3.1.3 Metode/Cara Pengukuran Kinerja.

Pengukuran kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Tabanan tahun 2025 dilakukan dengan menggunakan metode perbandingan antara rencana kinerja (*performance plan*) yang diinginkan dengan realisasi kinerja (*performance result*) yang dicapai organisasi. Hasil perbandingan tersebut selanjutnya dianalisis untuk menjawab terhadap penyebab terjadinya celah kinerja (*performance gap*) yang terjadi serta tindakan perbaikan yang diperlukan di masa mendatang.

Pengukuran kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Tabanan tahun 2025 mencakup indikator kinerja pada sasaran strategis. Kinerja sasaran strategis akan terlihat dari tingkat pencapaian target dari masing-masing indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen penetapan kinerja tahun 2025.

Nilai realisasi kinerja dilakukan dengan membandingkan rencana dan realisasi sebagai berikut:

- a. Apabila semakin tinggi realisasi menggambarkan pencapaian rencana tingkat capaian yang semakin baik, digunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Persentase capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

- b. Apabila Semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendah pencapaian rencana tingkat capaian, digunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Persentase capaian} = \frac{(2 \times \text{Rencana}) - \text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100 \%$$

Untuk mempermudah interpretasi atas pencapaian sasaran dan diberlakukan nilai serta makna dengan kriteria berikut :

Capaian (%)	Kategori
85 - 100	Sangat Baik
70 - <85	Baik
55 - <70	Cukup
<55	Kurang

Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan.

3.2 Capaian Kinerja Organisasi

3.2.1 Perbandingan Target dan Realisasi Indikator Kinerja Tahun 2025 dan Tahun Sebelumnya Dengan Renstra Dinas Kesehatan Tahun 2021 s/d 2026

Dalam rangka peningkatan kinerja serta lebih meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah diperlukan Indikator Kinerja dan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang digunakan sebagai ukuran keberhasilan dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Pengukuran indikator kinerja yang dilaksanakan adalah dengan membandingkan antara target kinerja sasaran dengan realisasi kinerja sasaran yang dihasilkan selama satu tahun. Berdasarkan hasil evaluasi dan analisis kinerja tersebut maka akan diketahui keberhasilan atau kegagalan dalam menjalankan tugas dan fungsinya sekaligus memperoleh gambaran strategi- strategi apa yang harus dipersiapkan pada tahun-tahun mendatang dalam upaya peningkatan kinerja guna tercapainya sasaran dan tujuan suatu organisasi.

Berdasarkan hasil pengukuran terhadap indikator kinerja sasaran strategis diperoleh capaian kinerja dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 3.1 Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dan Tahun Sebelumnya

No	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Definisi Operasional /Formula	Capaian Tahun 2024	2025			Target Akhir Tahun Renstra 2026	Capaian s/d 2025 terhadap 2026 (%)
						Target	Realisasi	Capaian (%)		
1	Terwujudnya Pemenuhan Hak Dasar Kesehatan		Persentase rata-rata Capaian SPM Kesehatan	Rata-rata Capaian Standar Pelayanan Minimal Kesehatan di Fasilitas Kesehatan di Kabupaten Tabanan	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2		Meningkatnya Sumber Daya Kesehatan sesuai standar	Persentase Sumber Daya Kesehatan yang terpenuhi sesuai standar	Jumlah sumber daya kesehatan yang terpenuhi sesuai standar pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan dibagi jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan	83,33%	80%	82,6%	103,3%	81%	102,8%
3	Terwujudnya kualitas tata kelola pemerintah di OPD		Hasil Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Hasil Evaluasi Inspektorat	Pada tahun 2024 tidak dilakukan penilaian PMPRB	A	Pada tahun 2025 tidak dilakukan penilaian PMPRB	n/a	A	n/a

No	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Definisi Operasional /Formula	Capaian Tahun 2024	2025			Target Akhir Tahun Renstra 2026	Capaian s/d 2025 terhadap 2026 (%)
						Target	Realisasi	Capaian (%)		
4		Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah	Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Hasil Evaluasi Inspektorat	78,20 (BB)	80 (A)	Belum dilakukan penilaian pada tahun 2025	n/a	80 (A)	n/a

Dari tabel 3.1 dapat dilihat bahwa Dinas Kesehatan bertugas dalam melaksanakan Tujuan 1 yakni : Terwujudnya Pemenuhan Hak Pelayanan Dasar Warga khususnya bidang kesehatan. Dimana indikatornya adalah Standar Pelayanan Minimal bidang kesehatan. Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal. Pemerintah Daerah menerapkan SPM untuk pemenuhan Jenis Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Dasar yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal. Penerapan SPM sebagaimana dimaksud diprioritaskan bagi Warga Negara yang berhak memperoleh Pelayanan Dasar secara minimal sesuai dengan Jenis Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Dasarnya. SPM Bidang Kesehatan merupakan acuan bagi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam penyediaan pelayanan kesehatan yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal. Jenis pelayanan dasar pada SPM Kesehatan Daerah Kabupaten/Kota terdiri atas:

1. Pelayanan kesehatan ibu hamil;
2. Pelayanan kesehatan ibu bersalin;
3. Pelayanan kesehatan bayi baru lahir;
4. Pelayanan kesehatan balita;
5. Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar;
6. Pelayanan kesehatan pada usia produktif;
7. Pelayanan kesehatan pada usia lanjut;
8. Pelayanan kesehatan penderita hipertensi;
9. Pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus;
10. Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat;
11. Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis; dan
12. Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus).

Capaian rata rata SPM Kesehatan di Kabupaten Tabanan pada tahun 2025, sebesar 100%. Standar Pelayanan Minimal Kesehatan yang telah ditetapkan oleh nasional adalah 100%. Berdasarkan Permenkes 6 Tahun 2024 Standar Pelayanan

Minimal Bidang Kesehatan yang selanjutnya disebut SPM Kesehatan adalah ketentuan mengenai jenis dan Mutu Pelayanan Dasar bidang kesehatan yang merupakan urusan pemerintahan wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal.

Sedangkan indikator kinerja pada sasaran : Meningkatnya Sumber Daya Kesehatan sesuai standar adalah Persentase Sumber Daya Kesehatan yang terpenuhi sesuai standar. Pada tahun 2025 capaian Persentase Sumber Daya Kesehatan yang terpenuhi sesuai standar adalah sebesar 82,6%. Hasil yang dicapai sudah melebihi target yang ditetapkan yakni 80%. Namun jika dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya, yakni pada tahun 2024, capaian tergolong mengalami penurunan dari 83,3% menjadi 82,6% dikarenakan adanya beberapa jenis tenaga Kesehatan yang purna tugas, namun tidak dibarengi dengan adanya pengangkatan tenaga kesehatan baru.

Untuk penilaian Laporan akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) dilaksanakan oleh Inspektorat Kabupaten Tabanan yang berpedoman kepada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, dimana dalam laporan tersebut harus memenuhi aspek Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja, Evaluasi Kinerja, dan Pencapaian Sasaran/ Kinerja Organisasi, disamping harus adanya sinkronisasi antara aspek-aspek tersebut.

Penilaian LKjIP dilaksanakan maksimal 2 bulan setelah tahun anggaran selesai, dan pada saat laporan ini dibuat, belum dilaksanakan evaluasi LKjIP oleh inspektorat kabupaten Tabanan. Sedangkan pada tahun 2024 nilai LKjIP yang dicapai Dinas Kesehatan Kabupaten Tabanan adalah 78,20 (BB). Nilai tersebut belum mencapai target yang ditetapkan yakni A. Beberapa upaya telah dilakukan Pemerintah Daerah dalam meningkatkan nilai LKjIP salah satunya dengan melakukan bimbingan teknis terkait penyusunan LKjIP dan telah menggunakan aplikasi e-SAKIP yang bertujuan untuk penginputan dokumen perencanaan dan evaluasi secara digital.

Sedangkan untuk penilaian PMPRB yang dilakukan oleh Inspektorat kabupaten Tabanan, dengan penilaian PMPRB ini akan memberikan gambaran

dalam rangka mengupayakan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN, peningkatan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat, dan peningkatan kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi. Namun pada tahun 2025 tidak dilakukan penilai PMPRB.

Tabel 3.2
Perbandingan Target, Realisasi, dan Capaian Kinerja Sasaran Tahun 2021, 2022, 2023, 2024 Dinas Kesehatan Kabupaten Tabanan

No	Tujuan	Sasaran Strategi s	Indikator Kinerja	2021			2022			2023			2024			2025			2026
				Tar get	Real isasi	Capai an	Targ et	Realis asi	Capai an	Targ et	Realis asi	Capai an	Targ et	Realis asi	Capai an	Targ et	Realis asi	Capai an	
1	Terwujudnya Pemenuhan Hak Dasar Kesehatan		Persentase rata-rata Capaian SPM Kesehatan	74 %	78.69%	106.34	100 %	79.50 %	79.5	100 %	90.20 %	90.20 %	100 %	100%	100%	100 %	100%	100%	100%
2		Meningkatnya Sumber Daya Kesehatan sesuai standar	Persentase Sumber Daya Kesehatan yang terpenuhi sesuai standar	78.35 %	n/a	n/a	78.50%	83.30 %	106.11	78.75%	79%	100.30%	79%	83.33 %	105.48%	80%	82.6%	103.3 %	81%
3	Terwujudnya kualitas tata kelola pemerintah di OPD		Hasil Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	BB	n/a	n/a	BB (70)	AA (93.31)	133.3	A	n/a	n/a	A	n/a	n/a	A	n/a	n/a	A
4		Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah	Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	BB (70)	BB (70.25)	100.36	BB (70)	A (80.85)	115.5	A (80)	BB (77.35)	96.69	A (80)	BB (78.2)	97.75	A	n/a	n/a	A

Dari Tabel di atas dapat dilihat bahwa dari tahun ke tahun untuk indikator nilai SPM Kesehatan telah mengalami peningkatan yang signifikan, dan pada tahun 2025 telah memenuhi target dengan mencapai nilai 100%. Dan untuk indikator Sumber Daya Kesehatan yang terpenuhi sesuai standar juga telah mengalami peningkatan dan pada tahun 2025 telah mencapai target yang ditetapkan dengan nilai capaian 82,6%. Untuk indikator Hasil evaluasi akuntabilitas kinerja perangkat daerah sudah mengalami peningkatan dari tahun ke tahun namun pada tahun 2024 mengalami penurunan dan belum mencapai target dengan nilai 78,2 (BB).

Berikut merupakan perbandingan capaian SPM Kesehatan dengan Standar Nasional dan Kabupaten lain Tahun 2025 :

Tabel 3.3
Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Tabanan dengan Standar Nasional Tahun 2025

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Nasional	Capaian Kabupaten Tabanan	Capaian Kabupaten Lain di Bali	Capaian Provinsi	Capaian Nasional
1	Terjaminnya Pemenuhan Hak Pelayanan Dasar Warga	Persentase capaian SPM Kesehatan (12 indikator) : 1. Pelayanan kesehatan ibu hamil; 2. Pelayanan kesehatan ibu bersalin; 3. Pelayanan kesehatan bayi baru lahir; 4. Pelayanan kesehatan balita; 5. Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar; 6. Pelayanan kesehatan pada usia produktif; 7. Pelayanan kesehatan pada usia lanjut; 8. Pelayanan kesehatan penderita hipertensi; 9. Pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus; 10. Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat; 11. Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis; dan 12. Pelayanan kesehatan	100% (Permenkes 6 Tahun 2024)	100%	Klungkung (100%)	Adanya perbedaan indikator SPM Kesehatan dengan Dikes Provinsi (indikator SPM Kesehatan Provinsi adalah : 1). Pelayanan Penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana 2). Pelayanan Penduduk pada kondisi kejadian luar biasa provinsi	N/A (Tidak ditemukannya data tentang rata rata capaian SPM Kabupaten Se-Nasional)

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Nasional	Capaian Kabupaten Tabanan	Capaian Kabupaten Lain di Bali	Capaian Provinsi	Capaian Nasional
		orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus).					
2	Meningkatnya Sumber Daya Kesehatan sesuai standar	Persentase Sumber Daya Kesehatan yang terpenuhi sesuai standar	100%	82.6%	n/a	n/a	n/a
3	Terwujudnya kualitas tata kelola pemerintah di OPD	Hasil Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	n/a	n/a (Pada tahun 2025 tidak dilakukan PMPRB)	n/a	n/a	n/a
4	Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah	Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	n/a	n/a (Nilai pada tahun 2025 belum rilis)	n/a	n/a	n/a

Capaian SPM Dinas Kesehatan Kabupaten Tabanan pada tahun 2025 sebesar 100%, nilai tersebut sama dengan capaian Kabupaten Klungkung yakni 100%. Hal ini disebabkan karena adanya suatu instruksi dari pemerintah pusat terkait standar pelayanan minimal yang harus diberikan kepada masyarakat yang menyebabkan daerah semakin memiliki komitmen dan kerja keras agar target SPM tercapai. Adapun bila terdapat perbedaan pada capaian dengan Kabupaten lain dapat dikarenakan oleh adanya perbedaan luas wilayah dan jumlah penduduk sehingga sasaran SPM pun berbeda, adanya perbedaan sebaran SDM kesehatan, faktor mobilitas penduduk dan faktor lainnya. Untuk perbandingan dengan capaian SPM Kesehatan tingkat provinsi dan nasional tidak dapat dilakukan karena adanya perbedaan indikator SPM Kesehatan pada tingkat Kabupaten dan Provinsi. Serta tidak ditemukannya data rata-rata capaian SPM Kesehatan Tingkat Kabupaten di seluruh Indonesia.

3.2.2 Analisis keberhasilan/ kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternatif solusi.

Pencapaian kinerja untuk indikator sasaran pada tahun 2025 yakni : Pada indikator rata rata capaian SPM Kesehatan dan Sumber Daya Kesehatan yang terpenuhi sesuai standar sudah cukup bagus, meskipun masih juga terdapat beberapa permasalahan yang menghambat tercapainya indikator sasaran tersebut secara optimal. Keberhasilan ini tidak terlepas dari penyebab internal dan eksternal. Adapun penyebab internal yang dimaksudkan antara lain ;

1. Telah adanya komitmen dan kepedulian yang tinggi dari baik dari pimpinan dan masing-masing penanggung jawab kegiatan untuk merealisasikan apa yang telah ditargetkan sebelumnya.
2. Perencanaan dari masing-masing kegiatan telah fokus pada apa yang akan dicapai dan tidak hanya fokus pada tindakan.
3. Telah diimplementasikannya penganggaran yang berbasis kinerja, dimana setiap tindakan atau anggaran yang dikeluarkan, diharapkan dapat menghasilkan sesuatu.
4. Telah dilaksanakannya rapat evaluasi setiap triwulan dalam pelaksanaan kegiatan baik terkait realisasi anggaran maupun realisasi fisiknya, untuk mengantisipasi terdapatnya kegiatan yang tidak fokus pada hasil. Dan hasil

dari rapat tersebut dijadikan acuan dalam perbaikan-perbaikan guna mencapai tujuan yang diharapkan.

5. Semakin optimalnya penyebaran informasi kesehatan melalui sosial media. Sementara penyebab eksternal terhadap keberhasilan pencapaian program/kegiatan yang kami maksudkan antara lain :

1. Adanya koordinasi yang baik dengan OPD lain yang berkaitan dengan bidang kesehatan.
2. Adanya komitmen dan kepedulian yang tinggi dari Pemerintah Daerah Kabupaten Tabanan dalam memberikan bimbingan dan konsultasi terhadap permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Kesehatan.
3. Adanya sinergitas program/kegiatan yang telah direncanakan dengan program dari OPD-OPD teknis di lingkungan Pemda Kabupaten Tabanan.

Selain terdapatnya penyebab eksternal dan internal yang mendukung keberhasilan kinerja, juga dimungkinkan terdapat beberapa penyebab yang dapat mengakibatkan kegagalan dalam mencapai kinerja yang telah ditetapkan. Pada dan nilai LKJIP belum mencapai target yang telah ditetapkan. Adapun penyebab kegagalan dan alternatif solusi yang telah dilakukan antara lain :

1. Adanya Kelemahan dalam Perencanaan dan Target Kinerja, dikarenakan beberapa target dalam indikator merupakan target yang telah ditetapkan oleh Pusat melalui proyeksi, yang pada kenyataan di lapangan tidak ditemukan target sebanyak itu.
2. Beberapa indikator sudah tidak dilakukan pengukuran pada tahun berjalannya Renstra. Contohnya Indeks Keluarga Sehat, dan Penilaian PMPRB
3. Adanya perubahan alokasi anggaran secara mendadak (pemotongan beberapa anggaran) yang mengganggu pencapaian target fisik/kinerja. Contohnya pada pembelian BMHP yang tidak dapat dilakukan karena adanya pemotongan anggaran sehingga pelaksanaan kegiatan seperti skrining tidak bisa dilaksanakan karena ketidakcukupan BMHP.
4. Masih kurangnya beberapa jenis tenaga Kesehatan di fasilitas Kesehatan milik pemerintah, dikarenakan tenaga Kesehatan yang purna tugas, serta tidak adanya pengangkatan tenaga Kesehatan baru pada jenis tenaga Kesehatan tersebut.

Sebagai solusi alternatif untuk mengurangi dampak-dampak yang diakibatkan oleh permasalahan-permasalahan tersebut diatas telah dilaksanakan beberapa solusi antara lain :

1. Melakukan perbaikan sistematis pada aspek perencanaan, pengukuran, dan pelaporan. Contohnya pada target yang terlalu tinggi dilakukan konsultasi kepada Dinas Kesehatan Provinsi dan juga Kemenkes.
2. Menganalisa anggaran yang perlu diprioritaskan.

3.2.3 Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Penggunaan sumber daya dalam rangka mendukung indicator kinerja dibedakan menjadi dua yaitu efisiensi sumber daya manusia dan sumber daya berupa biaya. Dari sisi sumber daya manusia banyak hal-hal yang terjadi penghematan, penggunaan media komunikasi secara daring dan pemanfaatan yang lebih optimal terhadap peran tenaga kesehatan dalam pendampingan, koordinasi dan evaluasi program kesehatan.

Untuk menghitung efisiensi sumber daya pada biaya dapat menggunakan rumus :

$$\text{Persentase efisiensi Biaya} = \frac{100\% - [\text{Realisasi Biaya} \times 100\%]}{\text{Target Biaya}}$$

Pada tahun 2025 realisasi biaya untuk semua program adalah Rp.277.059.911.065,00, sementara target biaya untuk semua program yaitu Rp.304.674.640.393,00. Dengan rumus efisiensi diatas, diperoleh persentase efisiensi biaya pada level program adalah 9,06%. Efisiensi ini timbul dikarenakan :

1. Penggunaan media social sebagai salah satu alat penyebar informasi
2. Alat penyimpanan elektronik yang dapat mengurangi biaya/cost pada pencetakan dan penggandaan
3. Adanya penawaran harga pada proses pengadaan barang dan jasa yang mendukung adanya efisiensi biaya
4. Terdapat pengadaan yang tidak dapat dilaksanakan karena terjadi kekosongan barang yang diperlukan pada aplikasi *ecatalog*, salah satunya vaksin anti rabies (VAR)
5. Terjadi penurunan jumlah peserta JKN karena adanya penonaktifan BPJS PBI (Penerima bantuan Iuran) dari pemerintah pusat, karena dianggap tidak

sesuai dengan kriteria penerima PBI, sehingga anggaran pada sub kegiatan Pengelolaan Jaminan Kesehatan Nasional tersisa.

3.2.4 Analisis program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja).

Pada tahun 2025, Dinas Kesehatan Kabupaten Tabanan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya melaksanakan 5 program, 20 Kegiatan dan 76 sub kegiatan untuk menopang ke dua sasaran utama yang menjadi Indikator kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Tabanan. Adapun rincian kegiatan/ Sub Kegiatan setiap program tersebut adalah sebagai berikut :

- A. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
 - 1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - 1.1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - 1.2 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - 2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - 2.1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - 2.2 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
 - 2.3 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD
 - 3. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
 - 3.1 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
 - 4. Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - 4.1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - 4.2 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
 - 4.3 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - 4.4 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - 4.5 Penyediaan Bahan/Material
 - 4.6 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
 - 4.7 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
 - 5. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - 5.1 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - 5.2 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

- 6 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - 6.1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 - 6.2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - 6.3 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- 7 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - 7.1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - 7.2 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- B. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat
 1. Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
 - 1.1 Pembangunan Puskesmas
 - 1.2 Pengembangan Puskesmas
 - 1.3 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas
 - 1.4 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya
 - 1.5 Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan
 - 1.6 Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan
 - 1.7 Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas
 2. Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
 - 2.1 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil
 - 2.2 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin
 - 2.3 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir
 - 2.4 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita
 - 2.5 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar
 - 2.6 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif
 - 2.7 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut
 - 2.8 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi

- 2.9 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus
- 2.10 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat
- 2.11 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis
- 2.12 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV
- 2.13 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat
- 2.14 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga
- 2.15 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan
- 2.16 Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan
- 2.17 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupunktur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya
- 2.18 Pengelolaan Surveilans Kesehatan
- 2.19 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA
- 2.20 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular
- 2.21 Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat
- 2.22 Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasyankes dan Sekolah
- 2.23 Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional
- 2.24 Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat
- 2.25 Penyediaan Telemedicine di Fasilitas Pelayanan Kesehatan
- 2.26 Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya
- 2.27 Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota
- 2.28 Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)
- 2.29 Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah
- 2.30 Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)
- 2.31 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Tuberkulosis
- 2.32 Pengelolaan pelayanan Kesehatan Orang Dengan HIV (ODHIV)
- 2.33 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Malaria
- 2.34 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak
- 3. Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi
 - 3.1 Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan

4. Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
 - 4.1 Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya
 - 4.2 Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
 - 4.3 Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan
 - 4.4 Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan
- C. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan
 1. Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota
 - 1.1 Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan
 2. Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota
 - 2.1 Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan
 - 2.2 Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan
 3. Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
 - 3.1 Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
- D. Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman
 1. Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)
 - 1.1 Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional(UMOT)
 2. Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga

- 2.1 Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga
3. Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan
 - 3.1 Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan
4. Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga
 - 4.1 Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan
- E. Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan
 1. Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
 - 1.1 Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat
 2. Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
 - 2.1 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)

Adapun data capaian kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Tabanan tahun 2025 dapat dilihat pada table dibawah ini :

Tabel 3.4 Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Dinas Kesehatan Kabupaten Tabanan Tahun 2025

PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (2024)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2025					Keterangan
			Target Renja Perangkat Daerah tahun 2025	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2025	Tingkat Realisasi Kinerja (%)	Tingkat Realisasi Kinerja (%) (Dengan pembulatan)	Kategori Kinerja	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi PD	99.30%	100%	100%	100.00%	100.00%	Sangat Baik	
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang dihasilkan	100%	100%	100%	100.00%	100.00%	Sangat Baik	
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	100%	3 Dokumen	3 Dokumen	100.00%	100.00%	Sangat Baik	
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	1 Dokumen	1 Dokumen	100.00%	100.00%	Sangat Baik	
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi PD	95.60%	100%	100%	100.00%	100.00%	Sangat Baik	

PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (2024)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2025					Keterangan
			Target Renja Perangkat Daerah tahun 2025	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2025	Tingkat Realisasi Kinerja (%)	Tingkat Realisasi Kinerja (%) (Dengan pembulatan)	Kategori Kinerja	
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	95.10%	17524 Orang	26039 Orang	148.59%	100.00%	Sangat Baik	Capaian melebihi target yang ditetapkan, karena adanya pengangkatan pegawai PPPK
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	91.80%	1 Dokumen	1 Dokumen	100.00%	100.00%	Sangat Baik	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	100%	4 Laporan	4 Laporan	100.00%	100.00%	Sangat Baik	
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Laporan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang dihasilkan	100%	100%	100%	100%	100%	Sangat Baik	
Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	100%	1 Dokumen	1 Dokumen	100.00%	100.00%	Sangat Baik	

PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (2024)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2025					Keterangan
			Target Renja Perangkat Daerah tahun 2025	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2025	Tingkat Realisasi Kinerja (%)	Tingkat Realisasi Kinerja (%) (Dengan pembulatan)	Kategori Kinerja	
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi PD	100%	100%	100%	100%	100%	Sangat Baik	
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	100%	1 Paket	1 Paket	100.00%	100.00%	Sangat Baik	
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	100%	3 Paket	3 Paket	100.00%	100.00%	Sangat Baik	
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	100%	1 Paket	1 Paket	100.00%	100.00%	Sangat Baik	
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	100%	1 Paket	1 Paket	100.00%	100.00%	Sangat Baik	
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan PerundangUndangan yang Disediakan	100%	n/a	n/a	n/a	n/a	-	
Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	100%	1 Paket	1 Paket	100.00%	100.00%	Sangat Baik	

PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (2024)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2025					Keterangan
			Target Renja Perangkat Daerah tahun 2025	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2025	Tingkat Realisasi Kinerja (%)	Tingkat Realisasi Kinerja (%) (Dengan pembulatan)	Kategori Kinerja	
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100%	15 Laporan	15 Laporan	100.00%	100.00%	Sangat Baik	
Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Arsip Dinamis pada SKPD yang dilakukan penatausahaan	100%	400 Dokumen	1012 Dokumen	253.00%	100.00%	Sangat Baik	
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang tersedia Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi PD yang	n/a	100%	100%	100.00%	100.00%	Sangat Baik	
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Disediakan	n/a	8 Unit	8 Unit	100.00%	100.00%	Sangat Baik	
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	n/a	8 Unit	8 Unit	100.00%	100.00%	Sangat Baik	
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase administrasi perkantoran yang mendukung kelancartugas dan fungsi PD	100%	100%	100%	100.00%	100.00%	Sangat Baik	
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	100%	1 Laporan	1 Laporan	100.00%	100.00%	Sangat Baik	

PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (2024)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2025					Keterangan
			Target Renja Perangkat Daerah tahun 2025	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2025	Tingkat Realisasi Kinerja (%)	Tingkat Realisasi Kinerja (%) (Dengan pembulatan)	Kategori Kinerja	
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	100%	12 Laporan	12 Laporan	100.00%	100.00%	Sangat Baik	
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	100%	1 Laporan	1 Laporan	100.00%	100.00%	Sangat Baik	
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dalam kondisi baik yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi PD	100%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	Sangat Baik	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	100%	1 Unit	1 Unit	100.00%	100.00%	Sangat Baik	
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	100%	60 unit	60 unit	100.00%	100.00%	Sangat Baik	

PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (2024)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2025					Keterangan
			Target Renja Perangkat Daerah tahun 2025	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2025	Tingkat Realisasi Kinerja (%)	Tingkat Realisasi Kinerja (%) (Dengan pembulatan)	Kategori Kinerja	
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Capaian Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	141.2% (100%)	81%	89.3	110.25%	100.00%	Sangat Baik	
Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan pemerintah yang mampu memberikan pelayanan kesehatan sesuai standar	128% (100%)	100%	63.45%	63.45%	63.45%	Cukup	
Pembangunan Puskesmas	Jumlah Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) yang Dibangun	n/a	3 Unit	1 Unit	33.33%	33.33%	Kurang	Adanya pemotongan anggaran untuk pembangunan puskesmas pada fase DPA
Pengembangan Puskesmas	Jumlah Puskesmas yang ditingkatkan Sarananya Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar	n/a	5 Unit	1 Unit	20.00%	20.00%	Kurang	Adanya pemotongan anggaran untuk pembangunan

PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (2024)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2025					Keterangan
			Target Renja Perangkat Daerah tahun 2025	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2025	Tingkat Realisasi Kinerja (%)	Tingkat Realisasi Kinerja (%) (Dengan pembulatan)	Kategori Kinerja	
								puskesmas pada fase DPA
Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang telah dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Puskesmas	n/a	2 Unit	2 Unit	100.00%	100.00%	Sangat Baik	
Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Sarana , Prasarana dan Alat Kesehatan yang telah dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Fasilitas Kesehatan Lainnya	100%	2 Unit	2 Unit	100.00%	100.00%	Sangat Baik	
Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	100%	n/a	n/a	n/a	n/a	-	
Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi	Jumlah Penyediaan dan Pemeliharaan Alat Uji dan Kalibrasi Pada Unit Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Regional/Regional Maintenance Center	100%	n/a	n/a	n/a	n/a	-	

PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (2024)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2025					Keterangan
			Target Renja Perangkat Daerah tahun 2025	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2025	Tingkat Realisasi Kinerja (%)	Tingkat Realisasi Kinerja (%) (Dengan pembulatan)	Kategori Kinerja	
Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar	116% (100%)	520 Unit	433 Unit	83.27%	83.27%	Baik	
Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai,Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang tersedia	99%	150 Paket	25 Paket	16.67%	16.67%	Kurang	Adanya perubahan aturan dari Kemenkes terkait jenis obat yang wajib tersedia di Puskesmas, menjadi 40 jenis obat, 25 jenis diantaranya diadakan di Dinas Kesehatan sementara 15 jenis diadakan melalui anggaran BLUD

PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (2024)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2025					Keterangan
			Target Renja Perangkat Daerah tahun 2025	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2025	Tingkat Realisasi Kinerja (%)	Tingkat Realisasi Kinerja (%) (Dengan pembulatan)	Kategori Kinerja	
Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan	Jumlah distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan ke Fasilitas Kesehatan	100%	22 Paket	20 Paket	90.91%	90.91%	Sangat Baik	Distribusi paket obat, dilakukan ke 20 puskesmas, 2 rumah sakit melakukan pengambilan langsung ke gudang farmasi
Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase jenis layanan kesehatan yang mampu dilayani secara prima	170% (100%)	100%	93.70%	93.70%	93.70%	Sangat Baik	
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	n/a	4404 Orang	4553 Orang	103.40%	100.00%	Sangat Baik	
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	n/a	4204 Orang	4505 Orang	107.20%	100.00%	Sangat Baik	

PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (2024)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2025					Keterangan
			Target Renja Perangkat Daerah tahun 2025	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2025	Tingkat Realisasi Kinerja (%)	Tingkat Realisasi Kinerja (%) (Dengan pembulatan)	Kategori Kinerja	
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	104.7% (100%)	4004 Orang	4484 Orang	112.00%	100.00%	Sangat Baik	
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	101.9% (100%)	22434 Orang	22821 Orang	101.70%	100.00%	Sangat Baik	
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	101.7% (100%)	52248 Orang	53459 Orang	102.30%	100.00%	Sangat Baik	
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	224.1% (100%)	67814 Orang	93610 Orang	138.00%	100.00%	Sangat Baik	
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	103.6% (100%)	57060 Orang	57882 Orang	101.40%	100.00%	Sangat Baik	
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	123.2% (100%)	44850 Orang	46644 Orang	104.00%	100.00%	Sangat Baik	

PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (2024)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2025					Keterangan
			Target Renja Perangkat Daerah tahun 2025	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2025	Tingkat Realisasi Kinerja (%)	Tingkat Realisasi Kinerja (%) (Dengan pembulatan)	Kategori Kinerja	
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	199.7% (100%)	5525 Orang	8781 Orang	158.90%	100.00%	Sangat Baik	
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	109.7% (100%)	1016 Orang	1076 Orang	105.90%	100.00%	Sangat Baik	
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	166.1% (100%)	1994 Orang	3594 Orang	180.20%	100.00%	Sangat Baik	
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	123.3% (100%)	5431 Orang	5496 Orang	101.20%	100.00%	Sangat Baik	
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	100.00%	1 Dokumen	1 Dokumen	100.00%	100.00%	Sangat Baik	

PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (2024)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2025					Keterangan
			Target Renja Perangkat Daerah tahun 2025	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2025	Tingkat Realisasi Kinerja (%)	Tingkat Realisasi Kinerja (%) (Dengan pembulatan)	Kategori Kinerja	
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	n/a	1 Dokumen	1 Dokumen	100.00%	100.00%	Sangat Baik	
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	100.00%	1 Dokumen	1 Dokumen	100.00%	100.00%	Sangat Baik	
Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	100.00%	1 Dokumen	1 Dokumen	100.00%	100.00%	Sangat Baik	
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupunktur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupunktur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	100.00%	1 Dokumen	1 Dokumen	100.00%	100.00%	Sangat Baik	
Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	100.00%	3 Dokumen	3 Dokumen	100.00%	100.00%	Sangat Baik	

PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (2024)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2025					Keterangan
			Target Renja Perangkat Daerah tahun 2025	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2025	Tingkat Realisasi Kinerja (%)	Tingkat Realisasi Kinerja (%) (Dengan pembulatan)	Kategori Kinerja	
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	900% (100%)	11 Orang	7 Orang	63.60%	63.60%	Cukup	
Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	100.00%	1 Dokumen	1 Dokumen	100.00%	100.00%	Sangat Baik	
Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	100.00%	4 Dokumen	4 Dokumen	100.00%	100.00%	Sangat Baik	
Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasyankes dan Sekolah	Jumlah Orang yang Menerima Layanan Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) dan Sekolah	100.00%	309791 Orang	674 Orang	0.20%	0.20%	Kurang	Adanya pemotongan anggaran yang memnyebabkan keterbatasan untuk membeli BMHP
Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan	100.00%	1 Paket	1 Paket	100.00%	100.00%	Sangat Baik	

PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (2024)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2025					Keterangan
			Target Renja Perangkat Daerah tahun 2025	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2025	Tingkat Realisasi Kinerja (%)	Tingkat Realisasi Kinerja (%) (Dengan pembulatan)	Kategori Kinerja	
Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	100.00%	1 Dokumen	1 Dokumen	100.00%	100.00%	Sangat Baik	
Penyediaan Telemedicine di Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) yang Melayani Konsultasi Jarak Jauh antar Fasyankes Melalui Pelayanan Telemedicine untuk Mendapatkan Akses Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas	n/a	5 Unit	3 Unit	60.00%	60.00%	Cukup	
Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	100.00%	1 Dokumen	1 Dokumen	100.00%	100.00%	Sangat Baik	
Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota	100.00%	21 Unit	21 Unit	100.00%	100.00%	Sangat Baik	

PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (2024)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2025					Keterangan
			Target Renja Perangkat Daerah tahun 2025	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2025	Tingkat Realisasi Kinerja (%)	Tingkat Realisasi Kinerja (%) (Dengan pembulatan)	Kategori Kinerja	
Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	100.00%	1 Laporan	1 Laporan	100.00%	100.00%	Sangat Baik	
Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	100.00%	1 Dokumen	1 Dokumen	100.00%	100.00%	Sangat Baik	
Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	Jumlah Public Safety Center (PSC 119) Tersediaan, Terkelolaan dan Terintegrasi Dengan Rumah Sakit Dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	100.00%	1 Unit	1 Unit	100.00%	100.00%	Sangat Baik	
Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	55.20%	551 orang	342 Orang	62.10%	62.10%	Cukup	

PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (2024)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2025					Keterangan
			Target Renja Perangkat Daerah tahun 2025	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2025	Tingkat Realisasi Kinerja (%)	Tingkat Realisasi Kinerja (%) (Dengan pembulatan)	Kategori Kinerja	
Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	9.10%	1456 orang	1502 Orang	103.20%	100.00%	Sangat Baik	
Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria	166.4% (100%)	589 orang	1747 Orang	296.60%	100.00%	Sangat Baik	
Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	100.00%	1 Dokumen	1 Dokumen	100.00%	100.00%	Sangat Baik	
Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang menyelenggarakan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi	n/a	100%	100%	100%	100%	Sangat Baik	
Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	n/a	1 Dokumen	1 Dokumen	100.00%	100.00%	Sangat Baik	

PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (2024)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2025					Keterangan
			Target Renja Perangkat Daerah tahun 2025	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2025	Tingkat Realisasi Kinerja (%)	Tingkat Realisasi Kinerja (%) (Dengan pembulatan)	Kategori Kinerja	
Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Fasilitas Kesehatan yang memenuhi standar perizinan	100%	55%	100%	181.82%	100.00%	Sangat Baik	
Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya	Jumlah Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Dikendalikan, Diawasi dan Ditindaklanjuti Perizinannya	100.00%	25 Unit	25 Unit	100.00%	100.00%	Sangat Baik	
Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Melakukan Peningkatan Tata Kelola Sesuai Standar	100.00%	25 Unit	25 Unit	100.00%	100.00%	Sangat Baik	

PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (2024)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2025					Keterangan
			Target Renja Perangkat Daerah tahun 2025	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2025	Tingkat Realisasi Kinerja (%)	Tingkat Realisasi Kinerja (%) (Dengan pembulatan)	Kategori Kinerja	
Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan kesehatan	100.00%	25 Unit	25 Unit	100.00%	100.00%	Sangat Baik	
Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan	Jumlah Dokumen Hasil Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan	100.00%	1 Dokumen	1 Dokumen	100.00%	100.00%	Sangat Baik	
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase fasilitas kesehatan milik pemerintah Kabupaten Tabanan yang memiliki jenis dan jumlah SDM Kesehatan yang memenuhi standar	133% (100%)	60%	82.6	137.67%	100.00%	Sangat Baik	
Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota	Persentase Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota	116.3% (100%)	88%	100	113.64%	100.00%	Sangat Baik	

PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (2024)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2025					Keterangan
			Target Renja Perangkat Daerah tahun 2025	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2025	Tingkat Realisasi Kinerja (%)	Tingkat Realisasi Kinerja (%) (Dengan pembulatan)	Kategori Kinerja	
Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	100%	1 Dokumen	1 Dokumen	100.00%	100.00%	Sangat Baik	
Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	Persentase Fasilitas Kesehatan Milik Pemerintah Kabupaten Tabanan yang memiliki dokumen perencanaan Kebutuhan SDM berdasarkan analisis beban kerja	100%	100%	100	100.00%	100.00%	Sangat Baik	
Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan	100%	24 Dokumen	18 Dokumen	75.00%	75.00%	Baik	
Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	705% (100%)	100	n/a	n/a	n/a	-	

PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (2024)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2025					Keterangan
			Target Renja Perangkat Daerah tahun 2025	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2025	Tingkat Realisasi Kinerja (%)	Tingkat Realisasi Kinerja (%) (Dengan pembulatan)	Kategori Kinerja	
Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	100%	1 Dokumen	1 Dokumen	100.00%	100.00%	Sangat Baik	
Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase tenaga kesehatan yang memiliki STR	93%	100%	89.17	89.17%	89.17%	Sangat Baik	
Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya	120% (100%)	100 orang	476 Orang	476.00%	100.00%	Sangat Baik	
PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN	Persentase Usaha farmasi, alat kesehatan dan makanan minuman yang memenuhi standar perijinan	108% (100%)	70%	70%	100.00%	100.00%	Sangat Baik	

PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (2024)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2025					Keterangan
			Target Renja Perangkat Daerah tahun 2025	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2025	Tingkat Realisasi Kinerja (%)	Tingkat Realisasi Kinerja (%) (Dengan pembulatan)	Kategori Kinerja	
MAKANAN MINUMAN								
Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Persentase Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) yang memiliki ijin sesuai standar	142.9% (100%)	70%	70%	100.00%	100.00%	Sangat Baik	
Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional(UMOT)	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	100%	40 Dokumen	40 Dokumen	100.00%	100.00%	Sangat Baik	
Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor PIRT sebagai Izin Produksi, untuk	Persentase Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat	133% (100%)	75%	75%	100.00%	100.00%	Sangat Baik	

PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (2024)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2025					Keterangan
			Target Renja Perangkat Daerah tahun 2025	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2025	Tingkat Realisasi Kinerja (%)	Tingkat Realisasi Kinerja (%) (Dengan pembulatan)	Kategori Kinerja	
Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga yang bersertifikat							
Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor PIRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor PIRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	100%	1 Dokumen	1 Dokumen	100.00%	100.00%	Sangat Baik	

PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (2024)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2025					Keterangan
			Target Renja Perangkat Daerah tahun 2025	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2025	Tingkat Realisasi Kinerja (%)	Tingkat Realisasi Kinerja (%) (Dengan pembulatan)	Kategori Kinerja	
Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	Persentase Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan yang mendapatkan stiker Pembinaan	133% (100%)	78%	78%	100.00%	100.00%	Sangat Baik	
Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	100%	1 Dokumen	1 Dokumen	100.00%	100.00%	Sangat Baik	
Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga	Persentase Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga yang dilakukan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut	153.8% (100%)	70%	70%	100.00%	100.00%	Sangat Baik	

PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (2024)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2025					Keterangan
			Target Renja Perangkat Daerah tahun 2025	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2025	Tingkat Realisasi Kinerja (%)	Tingkat Realisasi Kinerja (%) (Dengan pembulatan)	Kategori Kinerja	
Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan	Jumlah Produk dan Sarana Produksi Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga Beredar yang Dilakukan Pemeriksaan Post Market dalam rangka Tindak Lanjut Pengawasan	100%	40 Unit	40 Unit	100.00%	100.00%	Sangat Baik	
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase Desa Siaga Madya	162% (100%)	36%	67%	186.11%	100.00%	Sangat Baik	
Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kebijakan Publik yang di buat di bidang kesehatan	100%	1 Dokumen	1 Dokumen	100.00%	100.00%	Sangat Baik	

PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (2024)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2025					Keterangan
			Target Renja Perangkat Daerah tahun 2025	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2025	Tingkat Realisasi Kinerja (%)	Tingkat Realisasi Kinerja (%) (Dengan pembulatan)	Kategori Kinerja	
Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	100%	3 Dokumen	3 Dokumen	100.00%	100.00%	Sangat Baik	
Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat UKBM Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) yang dikembangkan	107% (100%)	75%	100%	133.33%	100.00%	Sangat Baik	
Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	100%	1 Dokumen	1 Dokumen	100.00%	100.00%	Sangat Baik	

Berdasarkan hasil evaluasi kegiatan tahun 2025, dari 76 sub kegiatan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Tabanan , sebanyak 67 indikator mencapai kategori sangat baik, 2 indikator mencapai kategori baik, 3 indikator mencapai kategori cukup, dan 4 indikator sub kegiatan mencapai kategori kurang.

3.3 Realisasi Anggaran Tahun 2025

Untuk mendukung pencapaian indikator sasaran yang telah ditetapkan dalam RPJMD tahun 2021-2026, Dinas Kesehatan telah menetapkan rencana kerja pada tahun 2025 yang telah dilakukan melalui program dan kegiatan. Adapun alokasi anggaran untuk pelaksanaan program dan kegiatan tersebut sebagai berikut :

Tabel 3.5 Realisasi Anggaran Pada Dinas Kesehatan Tahun 2025

No	Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	PAGU INDUK	PAGU PERUBAHAN	REALISASI KEUANGAN	%	SISA ANGGARAN
A	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	238,969,288,456.00	231,129,408,200	210,038,340,853	90.87	21,091,067,347
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4,862,000.00	4,862,000	4,552,602	93.64	309,398
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2,931,000.00	2,931,000	2,745,663	93.68	185,337
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1,931,000.00	1,931,000	1,806,939	93.58	124,061
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	234,313,071,000.00	225,954,832,184	205,545,227,840	90.97	20,409,604,344
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	234,305,896,000.00	225,947,657,184	205,538,410,942	90.97	20,409,246,242
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	4,738,000.00	4,738,000	4,490,412	94.77	247,588
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	2,437,000.00	2,437,000	2,326,486	95.47	110,514
3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	57,792,000.00	57,792,000	43,359,291	75.03	14,432,709
	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	57,792,000.00	57,792,000	43,359,291	75.03	14,432,709

No	Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	PAGU INDUK	PAGU PERUBAHAN	REALISASI KEUANGAN	%	SISA ANGGARAN
4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	240,274,800.00	266,674,800	253,639,286	95.11	13,035,514
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	9,471,800.00	9,471,800	8,806,640	92.98	665,160
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	20,000,000.00	20,000,000	14,085,866	70.43	5,914,134
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	43,013,000.00	43,013,000	41,232,120	95.86	1,780,880
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	23,940,000.00	23,940,000	21,530,764	89.94	2,409,236
	Penyediaan Bahan/Material	99,076,000.00	125,476,000	123,753,300	98.63	1,722,700
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	40,044,000.00	40,044,000	39,617,196	98.93	426,804
	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	4,730,000.00	4,730,000	4,613,400	97.53	116,600
5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	49,971,600.00	169,971,600	140,851,602	82.87	29,119,998
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	49,971,600.00	49,971,600	43,943,940	87.94	6,027,660
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	-	120,000,000	96,907,662	80.76	23,092,338
6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	4,053,343,456.00	4,425,302,016	3,822,053,932	86.37	603,248,084

No	Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	PAGU INDUK	PAGU PERUBAHAN	REALISASI KEUANGAN	%	SISA ANGGARAN
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	10,000,000.00	10,000,000	10,000,000	100.00	-
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	349,995,600.00	349,995,600	319,771,171	91.36	30,224,429
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	3,693,347,856.00	4,065,306,416	3,492,282,761	85.90	573,023,655
7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	249,973,600.00	249,973,600	228,656,300	91.47	21,317,300
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	199,973,600.00	199,973,600	181,681,300	90.85	18,292,300
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	50,000,000.00	50,000,000	46,975,000	93.95	3,025,000
B	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	67,797,816,448.00	71,600,218,454	65,156,400,093	91.00	6,443,818,361
1	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	10,622,373,546.00	10,502,373,546	9,966,229,637	94.90	536,143,909
	Pembangunan Puskesmas	-	436,400,000	431,051,304	98.77	5,348,696
	Pengembangan Puskesmas	2,406,692,000.00	2,406,692,000	2,372,421,409	98.58	34,270,591
	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	1,269,879,000.00	713,479,000	704,248,800	98.71	9,230,200

No	Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	PAGU INDUK	PAGU PERUBAHAN	REALISASI KEUANGAN	%	SISA ANGGARAN
	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya	499,655,000.00	499,655,000	493,716,221	98.81	5,938,779
	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	217,658,240.00	217,658,240	210,197,964	96.57	7,460,276
	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	6,174,075,106.00	6,174,075,106	5,706,187,439	92.42	467,887,667
	Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan	54,414,200.00	54,414,200	48,406,500	88.96	6,007,700
2	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	57,063,678,402.00	60,986,080,408	55,098,767,909	90.35	5,887,312,499
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	19,136,000.00	19,136,000	17,920,500	93.65	1,215,500
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	210,168,000.00	210,168,000	200,885,400	95.58	9,282,600
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	9,411,000.00	9,411,000	8,765,160	93.14	645,840
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	9,403,000.00	9,403,000	8,867,096	94.30	535,904

No	Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	PAGU INDUK	PAGU PERUBAHAN	REALISASI KEUANGAN	%	SISA ANGGARAN
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	23,620,000.00	23,620,000	22,140,307	93.74	1,479,693
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	28,845,000.00	28,845,000	26,841,704	93.05	2,003,296
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	684,299,000.00	684,299,000	630,823,592	92.19	53,475,408
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	7,308,000.00	7,308,000	6,683,460	91.45	624,540
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	8,576,000.00	8,576,000	7,784,980	90.78	791,020
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	15,127,000.00	15,127,000	14,223,256	94.03	903,744
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	168,550,000.00	168,550,000	159,990,000	94.92	8,560,000
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	273,174,700.00	273,174,700	267,758,000	98.02	5,416,700
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	14,251,800.00	14,251,800	13,321,000	93.47	930,800
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	55,316,000.00	55,316,000	52,273,020	94.50	3,042,980
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	121,772,760.00	121,772,760	120,065,850	98.60	1,706,910
	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	167,838,100.00	167,838,100	152,670,200	90.96	15,167,900

No	Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	PAGU INDUK	PAGU PERUBAHAN	REALISASI KEUANGAN	%	SISA ANGGARAN
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya	9,505,000.00	9,505,000	8,707,510	91.61	797,490
	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	91,304,000.00	91,304,000	55,863,000	61.18	35,441,000
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	4,278,000.00	4,278,000	3,227,680	75.45	1,050,320
	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	2,305,713,100.00	2,460,189,600	1,258,405,296	51.15	1,201,784,304
	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	50,884,005,552.00	54,635,787,398	50,554,451,200	92.53	4,081,336,198
	Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasyankes dan Sekolah	239,184,000.00	239,184,000	221,474,592	92.60	17,709,408
	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	182,132,000.00	182,132,000	23,133,750	12.70	158,998,250
	Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	38,620,000.00	38,620,000	33,717,210	87.31	4,902,790
	Penyediaan Telemedicine di Fasilitas Pelayanan Kesehatan	14,664,000.00	14,664,000	12,301,860	83.89	2,362,140
	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	798,212,490.00	814,356,150	681,167,001	83.64	133,189,149
	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	16,063,000.00	16,063,000	9,850,235	61.32	6,212,765

No	Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	PAGU INDUK	PAGU PERUBAHAN	REALISASI KEUANGAN	%	SISA ANGGARAN
	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	4,856,000.00	4,856,000	-	0.00	4,856,000
	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	57,584,000.00	57,584,000	25,599,794	44.46	31,984,206
	Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	23,791,000.00	23,791,000	14,206,556	59.71	9,584,444
	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	4,240,000.00	4,240,000	3,877,000	91.44	363,000
	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	4,240,000.00	4,240,000	3,884,500	91.62	355,500
	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	29,241,000.00	29,241,000	28,411,000	97.16	830,000
	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	539,248,900.00	539,248,900	449,476,200	83.35	89,772,700
3	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	48,148,500.00	48,148,500	38,299,426	79.54	9,849,074
	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	48,148,500.00	48,148,500	38,299,426	79.54	9,849,074
4	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	63,616,000.00	63,616,000	53,103,121	83.47	10,512,879

No	Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	PAGU INDUK	PAGU PERUBAHAN	REALISASI KEUANGAN	%	SISA ANGGARAN
	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya	9,520,000.00	9,520,000	7,846,261	82.42	1,673,739
	Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	16,175,000.00	16,175,000	10,582,040	65.42	5,592,960
	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	23,689,000.00	23,689,000	21,502,000	90.77	2,187,000
	Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan	14,232,000.00	14,232,000	13,172,820	92.56	1,059,180
C	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	1,243,884,000.00	1,243,884,000	1,194,310,771	96.01	49,573,229
1	Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota	9,568,000.00	9,568,000	8,662,065	90.53	905,935
	Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	9,568,000.00	9,568,000	8,662,065	90.53	905,935
2	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	147,002,000.00	147,002,000	142,926,195	97.23	4,075,805

No	Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	PAGU INDUK	PAGU PERUBAHAN	REALISASI KEUANGAN	%	SISA ANGGARAN
	Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan	9,682,000.00	9,682,000	9,057,195	93.55	624,805
	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	137,320,000.00	137,320,000	133,869,000	97.49	3,451,000
3	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1,087,314,000.00	1,087,314,000	1,042,722,511	95.90	44,591,489
	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1,087,314,000.00	1,087,314,000	1,042,722,511	95.90	44,591,489
D	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	309,844,739.00	309,844,739	283,053,397	91.35	26,791,342
1	Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	84,617,739.00	84,617,739	79,882,750	94.40	4,734,989
	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional(UMOT)	84,617,739.00	84,617,739	79,882,750	94.40	4,734,989

No	Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	PAGU INDUK	PAGU PERUBAHAN	REALISASI KEUANGAN	%	SISA ANGGARAN
2	Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor PIRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	14,310,000.00	14,310,000	12,151,200	84.91	2,158,800
	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor PIRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	14,310,000.00	14,310,000	12,151,200	84.91	2,158,800
3	Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	16,540,000.00	16,540,000	15,932,875	96.33	607,125
	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	16,540,000.00	16,540,000	15,932,875	96.33	607,125

No	Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	PAGU INDUK	PAGU PERUBAHAN	REALISASI KEUANGAN	%	SISA ANGGARAN
4	Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga	194,377,000.00	194,377,000	175,086,572	90.08	19,290,428
	Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan	194,377,000.00	194,377,000	175,086,572	90.08	19,290,428
E	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	391,285,000.00	391,285,000	387,805,951	99.11	3,479,049
1	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	363,285,000.00	363,285,000	362,105,952	99.68	1,179,048
	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	363,285,000.00	363,285,000	362,105,952	99.68	1,179,048
2	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat UKBM Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	28,000,000.00	28,000,000	25,699,999	91.79	2,300,001

No	Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	PAGU INDUK	PAGU PERUBAHAN	REALISASI KEUANGAN	%	SISA ANGGARAN
	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	28,000,000.00	28,000,000	25,699,999	91.79	2,300,001
			304,674,640,393	277,059,911,065	90.94	27,614,729,328

Pada tahun 2025, realisasi anggaran untuk mendukung tercapainya sasaran strategis adalah sebesar Rp. 277.059.911.065,00 atau sebesar 90,94% anggaran. Adanya efisiensi anggaran tersebut menyesuaikan dengan besaran kasus yang ditemukan pada tahun 2025 sesuai dengan kondisi di lapangan. Dan adanya penawaran harga pada saat proses pengadaan barang dan jasa juga berpengaruh pada adanya efisiensi anggaran.

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Kesehatan Kabupaten Tabanan disusun berdasarkan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Tahun Anggaran 2025, serta Penetapan Kinerja Tahun 2025 sebagai pelaksanaan akuntabilitas kinerja instansi yang merupakan wujud pertanggungjawaban dalam pencapaian misi dan tujuan instansi.

Tujuan penyusunan laporan ini adalah untuk memberikan gambaran tingkat pencapaian sasaran maupun tujuan instansi sebagai jabaran dari visi, misi dan strategi instansi yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.

Proses penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) terdiri dari pengumpulan dokumen-dokumen yang dibutuhkan seperti Rencana Strategis Dinas Kesehatan Tabanan, Rencana Kerja Tahunan dan penetapan Capaian Kinerja. Disamping hal tersebut yang dilakukan adalah melakukan pengumpulan capaian kinerja dengan data-data yang akurat, melakukan evaluasi kinerja dan melakukan analisis akuntabilitas

Berdasarkan hasil evaluasi kegiatan tahun 2025, dari 76 sub kegiatan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Tabanan, sebanyak 67 indikator mencapai kategori sangat baik, 2 indikator mencapai kategori baik, 3 indikator mencapai kategori cukup, dan 4 indikator sub kegiatan mencapai kategori kurang.

Adapun keberhasilan atas pencapaian target indikator dari program kegiatan yang telah ditetapkan adalah tidak lepas dari peran serta semua pihak yang terlibat didalam pencapaian indikator sasaran. Keberhasilan tersebut merupakan cerminan dari telah berjalannya sistem kerja di lingkungan Dinas Kesehatan Tabanan yang berlaku dan didukung oleh suasana kerja yang dinamis dan bersinergis satu sama lainnya. Keberhasilan yang telah tercapai di lingkungan Dinas Kesehatan Tabanan antara lain semakin meningkatnya kualitas kerja para pegawai yang membawa dampak kepada peningkatan kualitas kinerja pegawai di lingkungan Dinas Kesehatan Tabanan. Atas keberhasilan yang telah dicapai

tersebut tentunya perlu diberikan apresiasi atau penghargaan kepada semua pihak yang berperan serta didalamnya. Hasil analisis terhadap keberhasilan pencapaian realisasi target kinerja dipengaruhi oleh banyak faktor, baik dari internal maupun external, namun dengan kemampuan dan sumber daya yang dimiliki, Dinas Kesehatan Tabanan mampu memaksimalkan potensi sumber daya tersebut. Sehingga potensi yang dimiliki mampu mendukung ketercapaian realisasi target indikator kinerja tersebut. Adapun hambatan maupun kendala yang dihadapi dalam pencapaian indikator sasaran, dijadikan sebagai isu strategis yang akan diselesaikan bersama oleh semua pihak manajemen di lingkungan Dinas Kesehatan Tabanan, dan ini menjadi tantangan yang harus ditangani dengan baik.

4.2 Saran

Berdasarkan uraian di atas maka berikut ini disampaikan beberapa saran untuk meningkatkan pencapaian hasil kegiatan, program maupun kebijaksanaan dimasa yang akan datang :

1. Perlu peningkatan komitmen bersama untuk menerapkan Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintahan (SAKIP), sebagai instrumen kontrol yang objektif dan transparan dalam mengelola dan pelaksanaan program kegiatan di Kantor Dinas Kesehatan;
2. Keterbukaan didalam memberikan data dan informasi untuk penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) perlu dilakukan untuk mendukung keakuratan dan keabsahan data didalam dokumen LKJIP;
3. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) yang telah disusun menjadi bahan evaluasi kinerja di lingkungan pemerintahan khususnya di Kantor Dinas Kesehatan, dan dijadikan sebagai acuan untuk perbaikan dalam penyusunan laporan tahun berikutnya.

Demikian laporan ini disusun sebagai bahan masukan bagi semua pihak yang berkepentingan dan menjadi bahan evaluasi terhadap kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Tabanan untuk dijadikan bahan acuan dalam perbaikan dimasa yang akan datang.